SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TNP2K
TIM NASIONAL
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL UTAMA

Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial Papua dan Papua Barat

Latar Belakang

- Secara umum, pertumbuhan ekonomi Papua dan Papua Barat selama tahun 2020 memiliki pola yang hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Pada tahun 2019, Papua mengalami kontraksi ekonomi sebesar -15,72 persen, disebabkan oleh turunnya produksi Pertambangan dan Penggalian sebesar 43,21 persen yang mengakibatkan turunnya Ekspor Luar Negeri sebesar 69,10 persen.

1

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per Kapita, 2018-2020 (Triwulan 3)

Wilayah	2018	2019	Q1:2020	Q2:2020	Q3:2020
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)					
Papua	7,37	-15,72	1,32	4,18	-2,61
Papua Barat	6,26	2,66	5,14	0,53	-3,35
Indonesia	5,17	5,02	2,97	-5,32	-3,49
Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)					
Papua	63,43	56,14			
Papua Barat	24,02	25,63			
Indonesia	56	59,1			

Sumber: Berita Resmi Statistik Papua dan Papua Barat, BPS (diolah)

2

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TNP2K TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Papua dan Papua Barat

1. Kemiskinan
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Usaha Mikro dan Kecil
5. Ketenagakerjaan
6. Infrastruktur
7. Pencapaian SDGs

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

3

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TNP2K TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1 Kemiskinan

4

Kemiskinan (1)

- Papua dan Papua Barat menduduki urutan pertama dan kedua provinsi dengan angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia.
- Namun demikian, provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin maupun miskin ekstrem terbanyak di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
- Kondisi kemiskinan di Papua dan Papua Barat ini diperparah dengan tingginya tingkat ketimpangan (rasio gini) yang melebihi angka nasional.
- Memperhatikan sebaran lokasi tempat tinggal, 95 persen penduduk miskin di Papua dan 88 persen penduduk miskin di Papua Barat tinggal di daerah perdesaan.

5

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Menurut Provinsi, 2020 (Persen)

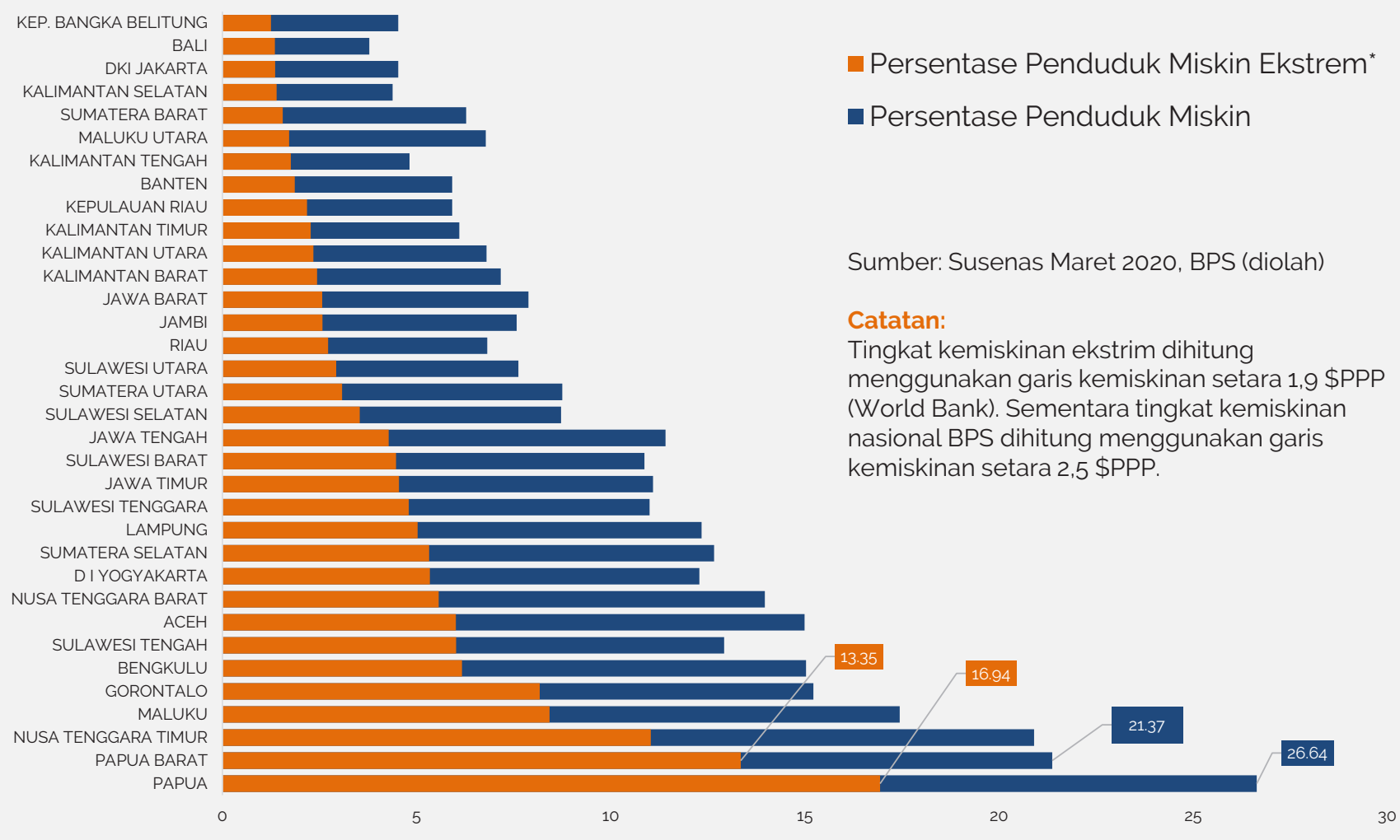

Sumber: Susenas Maret 2020, BPS (diolah)

Catatan:
Tingkat kemiskinan ekstrim dihitung menggunakan garis kemiskinan setara 1,9 $PPP (World Bank). Sementara tingkat kemiskinan nasional BPS dihitung menggunakan garis kemiskinan setara 2,5 $PPP.

6

Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem Menurut Provinsi, 2020 (Ribu Jiwa)

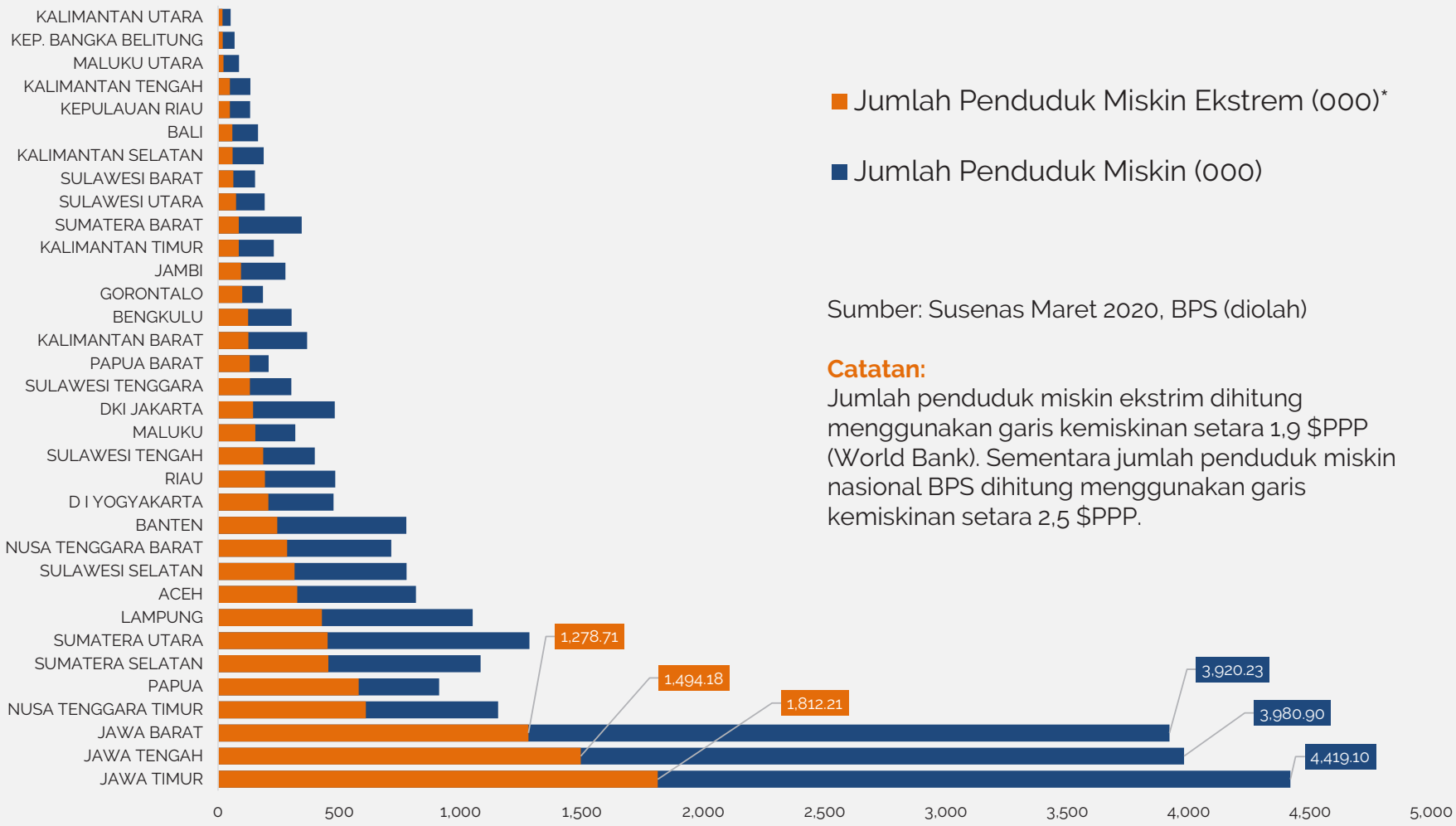

Sumber: Susenas Maret 2020, BPS (diolah)

Catatan:
Jumlah penduduk miskin ekstrim dihitung menggunakan garis kemiskinan setara 1,9 $PPP (World Bank). Sementara jumlah penduduk miskin nasional BPS dihitung menggunakan garis kemiskinan setara 2,5 $PPP.

7

Tabel 2. Kemiskinan dan Ketimpangan, 2020

Keterangan	Papua	Papua Barat	Indonesia
Tingkat kemiskinan (persen)	26,64	21,37	9,78
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	911.370	208.580	26.420.000
- Tinggal di perkotaan (jiwa)	43.630	24.090	11.160.000
- Tinggal di perdesaan (jiwa)	867.740	184.490	15.260.000
Rasio Gini	0,392	0,382	0,381

Sumber: Susenas Maret 2020, BPS (diolah)

8

Kemiskinan (2)

- Mayoritas penduduk miskin di Papua dan Papua Barat bekerja di sektor pertanian.
- Proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan penduduk miskin di Papua dan Papua Barat lebih besar daripada penduduk tidak miskin.

9

Gambar 3. Penduduk Miskin Usia 15+ Menurut Sektor Bekerja, 2019

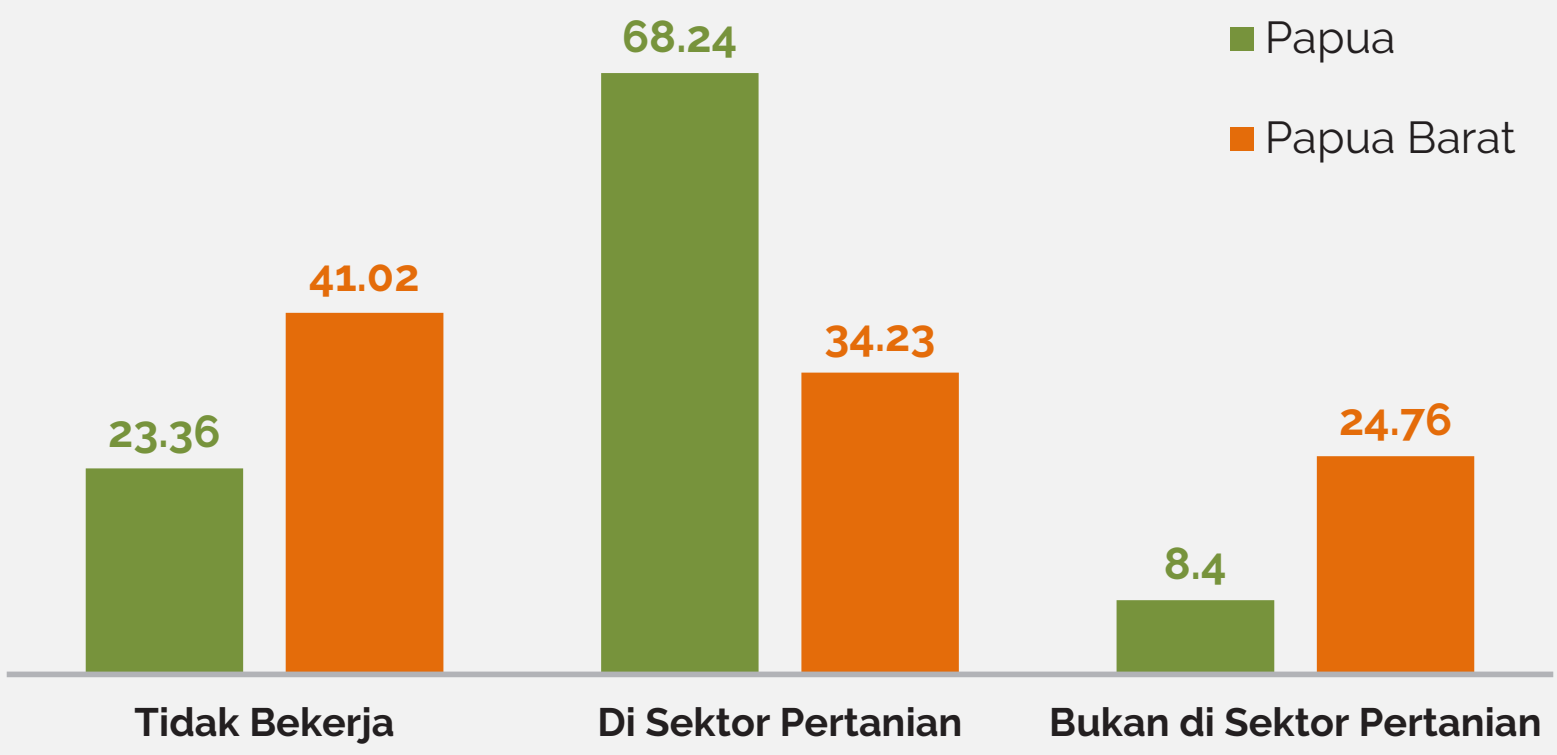

Sumber: Susenas Maret 2019, BPS

10

Gambar 4. Persentase Pengeluaran Per Kapita untuk Makanan, 2019

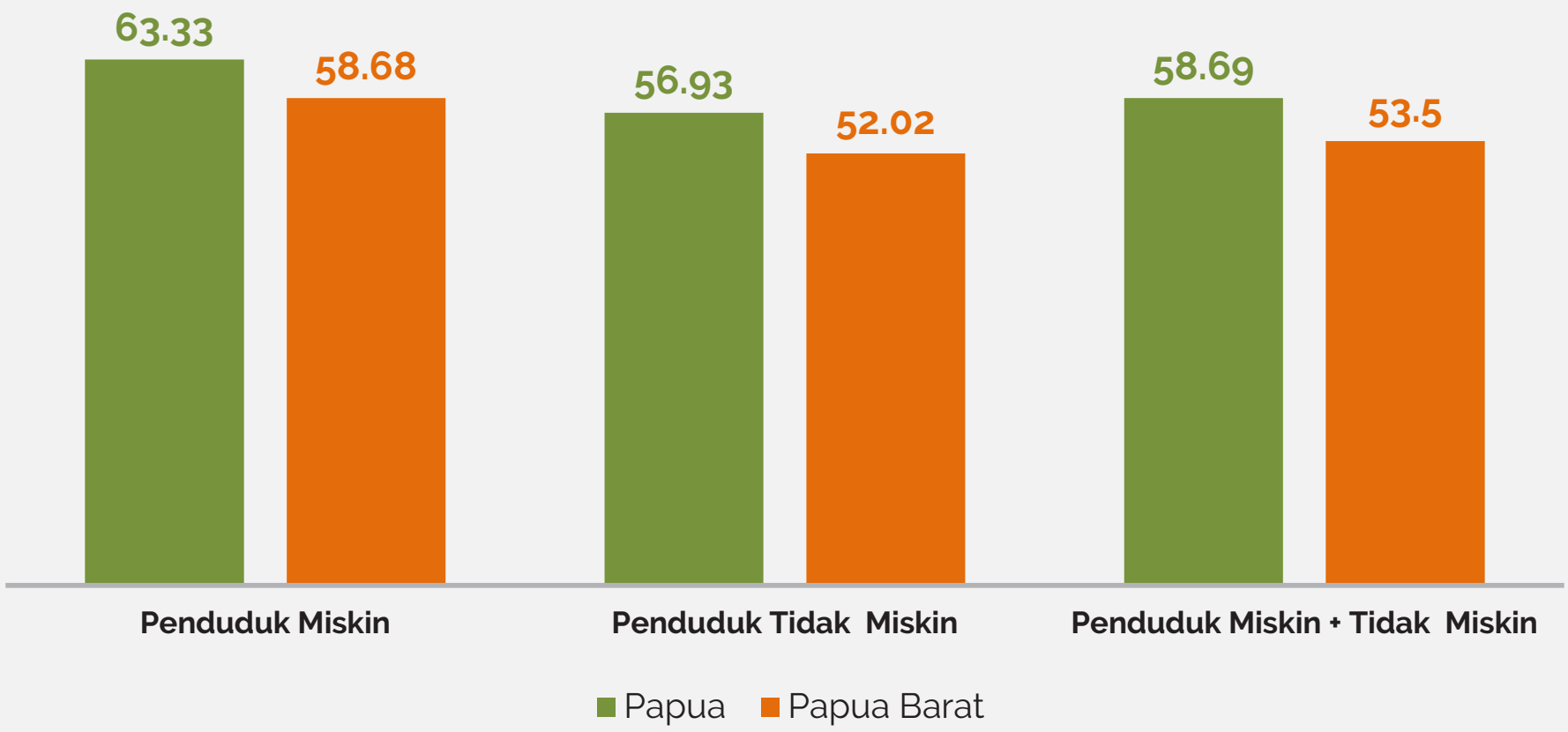

Sumber: Susenas Maret 2019, BPS

11

Kemiskinan (3)

- Secara umum, jenjang pendidikan penduduk miskin di Papua Barat lebih tinggi dibanding Papua.
- Angka melek huruf (bisa baca dan tulis) penduduk miskin di Papua Barat lebih tinggi dibanding Papua.
- Sampai dengan kelompok usia 15 tahun, penduduk miskin di Papua Barat yang mengenyam pendidikan (sekolah) lebih banyak dibanding Papua.

12

Gambar 5. Capaian Pendidikan Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas, 2019

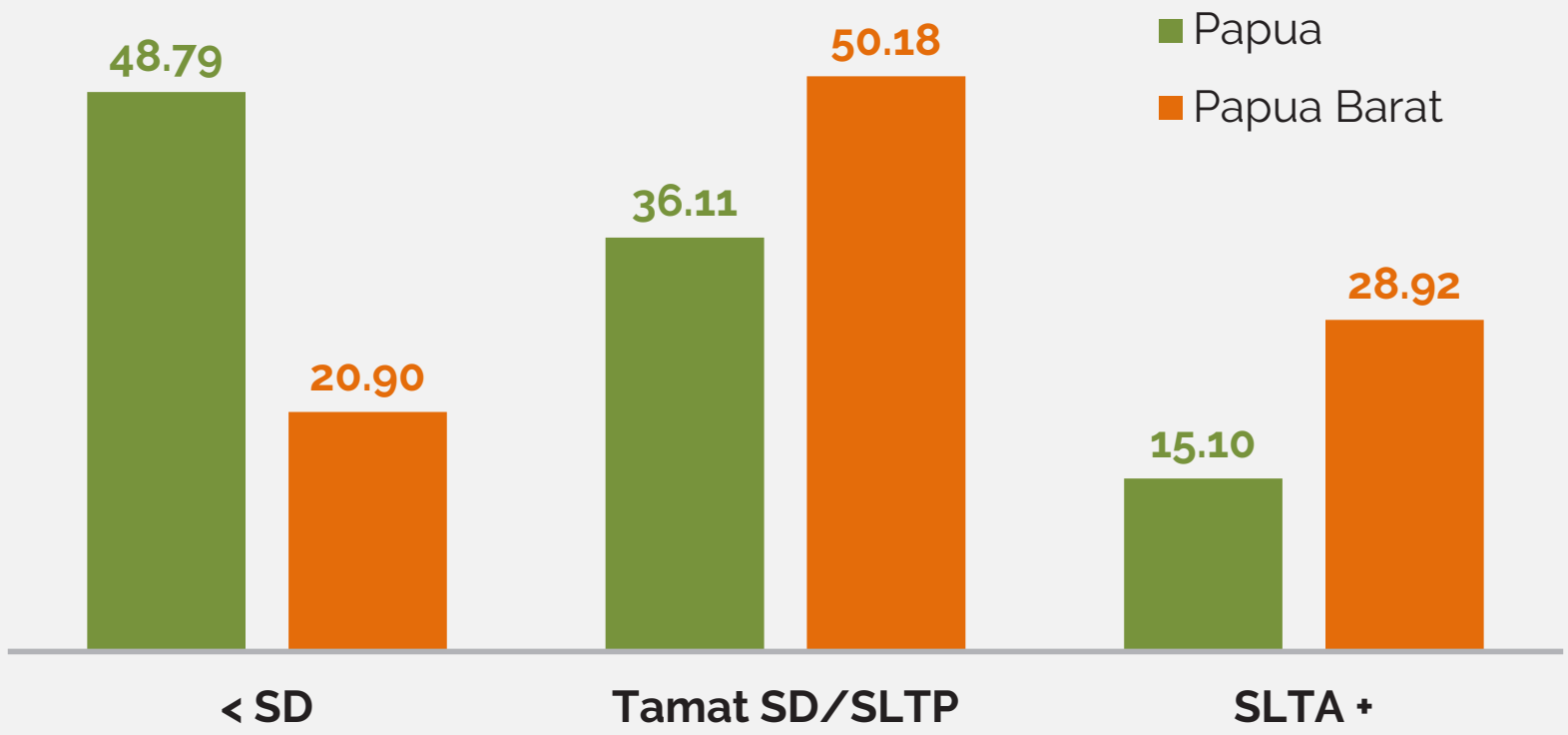

Sumber: Susenas Maret 2019, BPS

13

Gambar 6. Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas, 2019

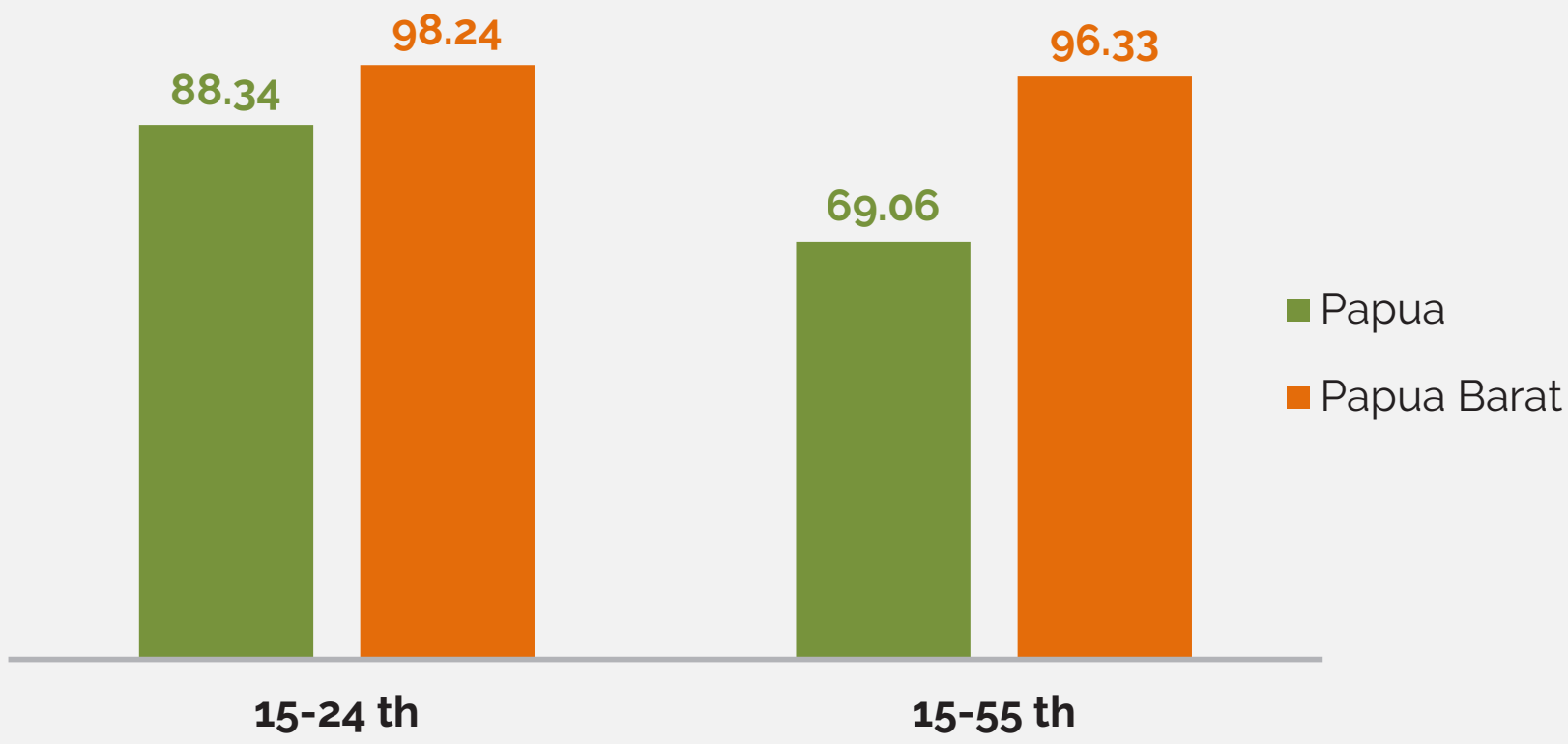

Sumber: Susenas Maret 2019, BPS

14

Gambar 7. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin, 2019

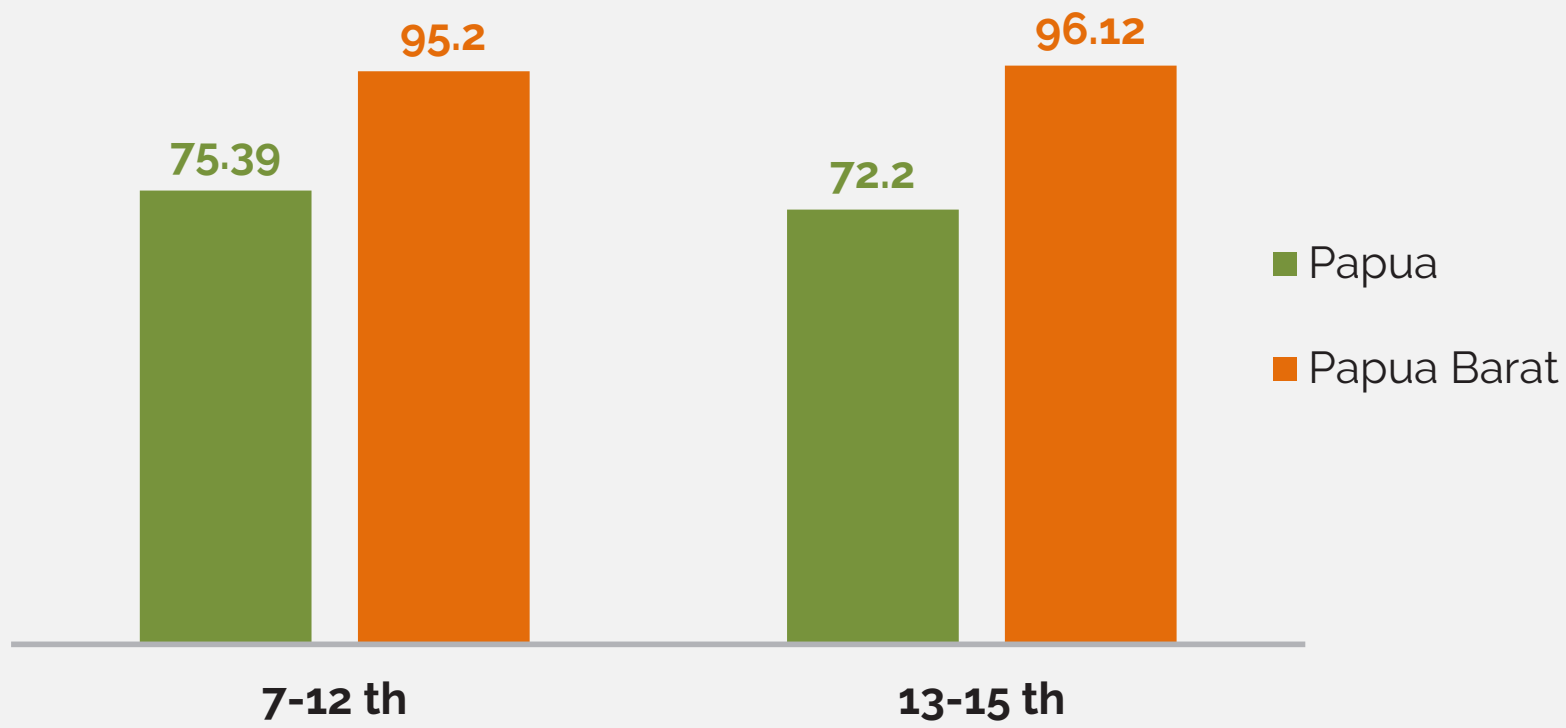

Sumber: Susenas Maret 2019, BPS

15

Kemiskinan (4)

- Rumah tangga miskin di Papua Barat lebih banyak yang menggunakan air layak dan jamban sendiri/bersama dibandingkan Papua.

16

Gambar 8. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama, 2019

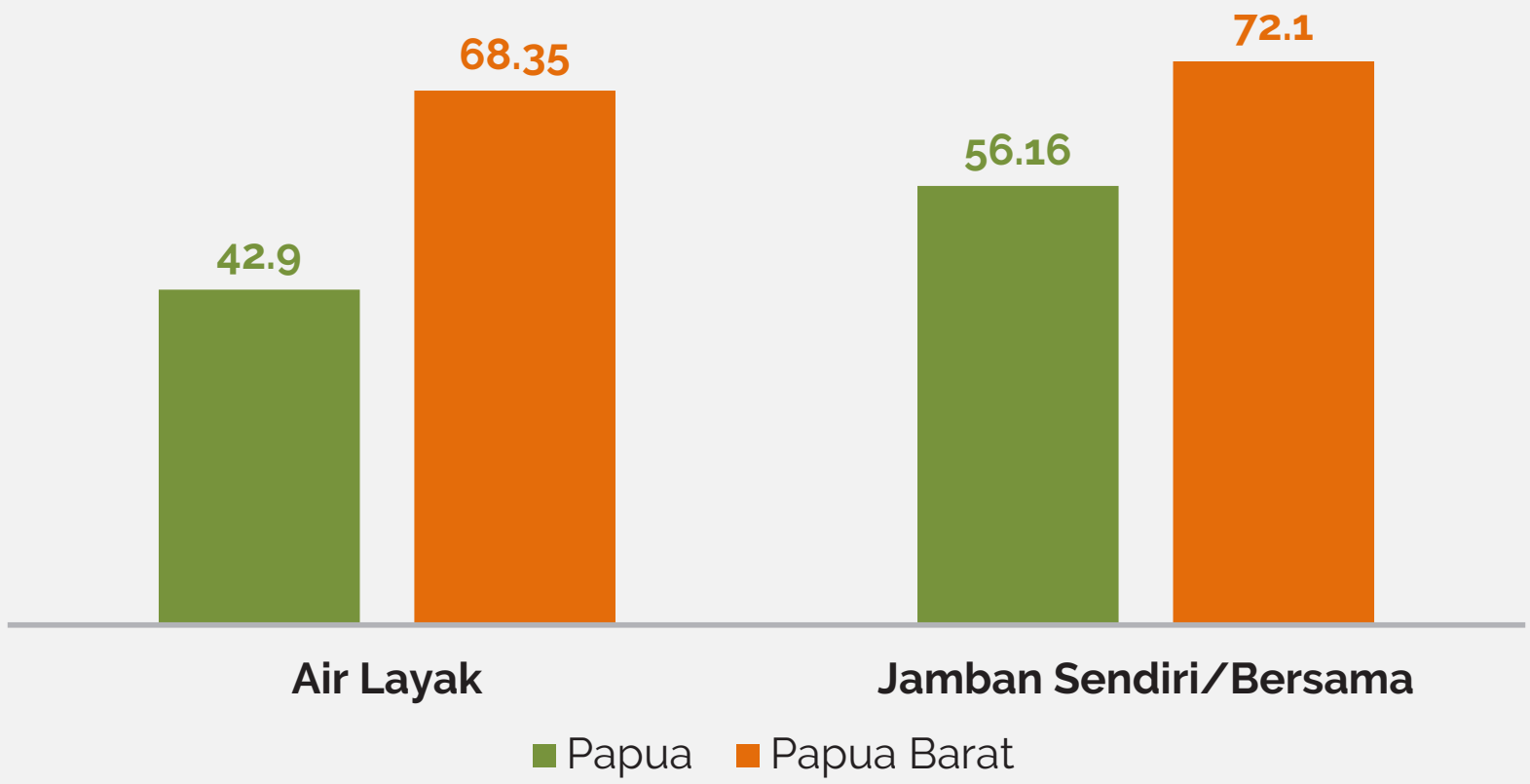

Sumber: Susenas Maret 2019, BPS

17

Kemiskinan (5)

- Pada tahun 2020, terdapat 8 dari 29 kabupaten/kota di Papua dan 2 dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan penduduk miskin banyak (atau sering disebut sebagai kantong kemiskinan).
- Sebagai contoh:
  - Kabupaten Jayawijaya (Gambar 9) yang berada pada kuadran 1 (kanan atas) dikategorikan sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin tinggi (di atas rata-rata) serta jumlah penduduk miskin banyak (di atas rata-rata).
  - Kabupaten Sorong (Gambar 10) yang berada pada kuadran 1 (kanan atas) dikategorikan sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin tinggi (di atas rata-rata) serta jumlah penduduk miskin banyak (di atas rata-rata).

18

Gambar 9. Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasar Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Papua, 2020

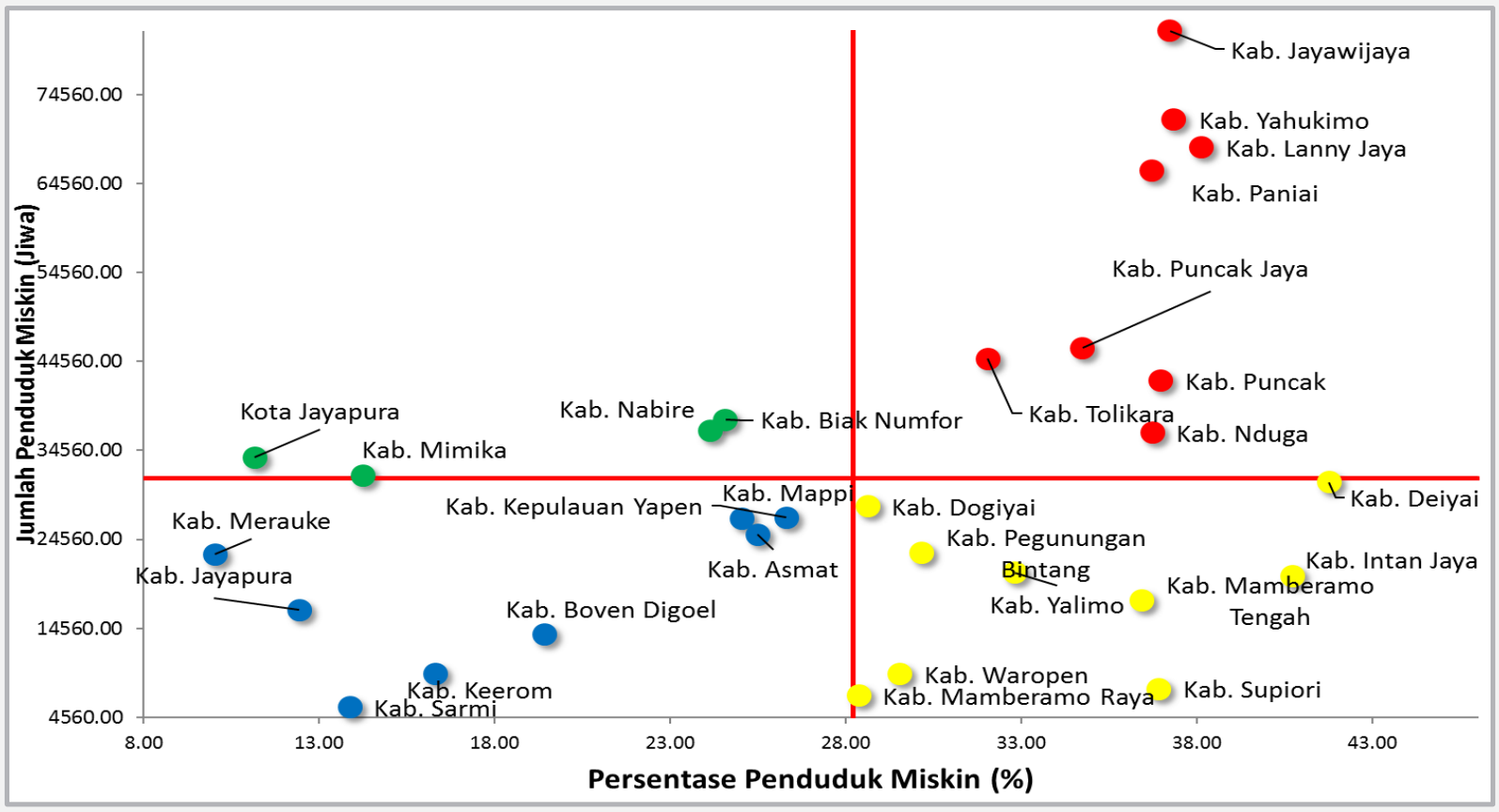

Sumber: Susenas Maret 2020, BPS (diolah)

Gambar 10. Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasar Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Papua Barat, 2020

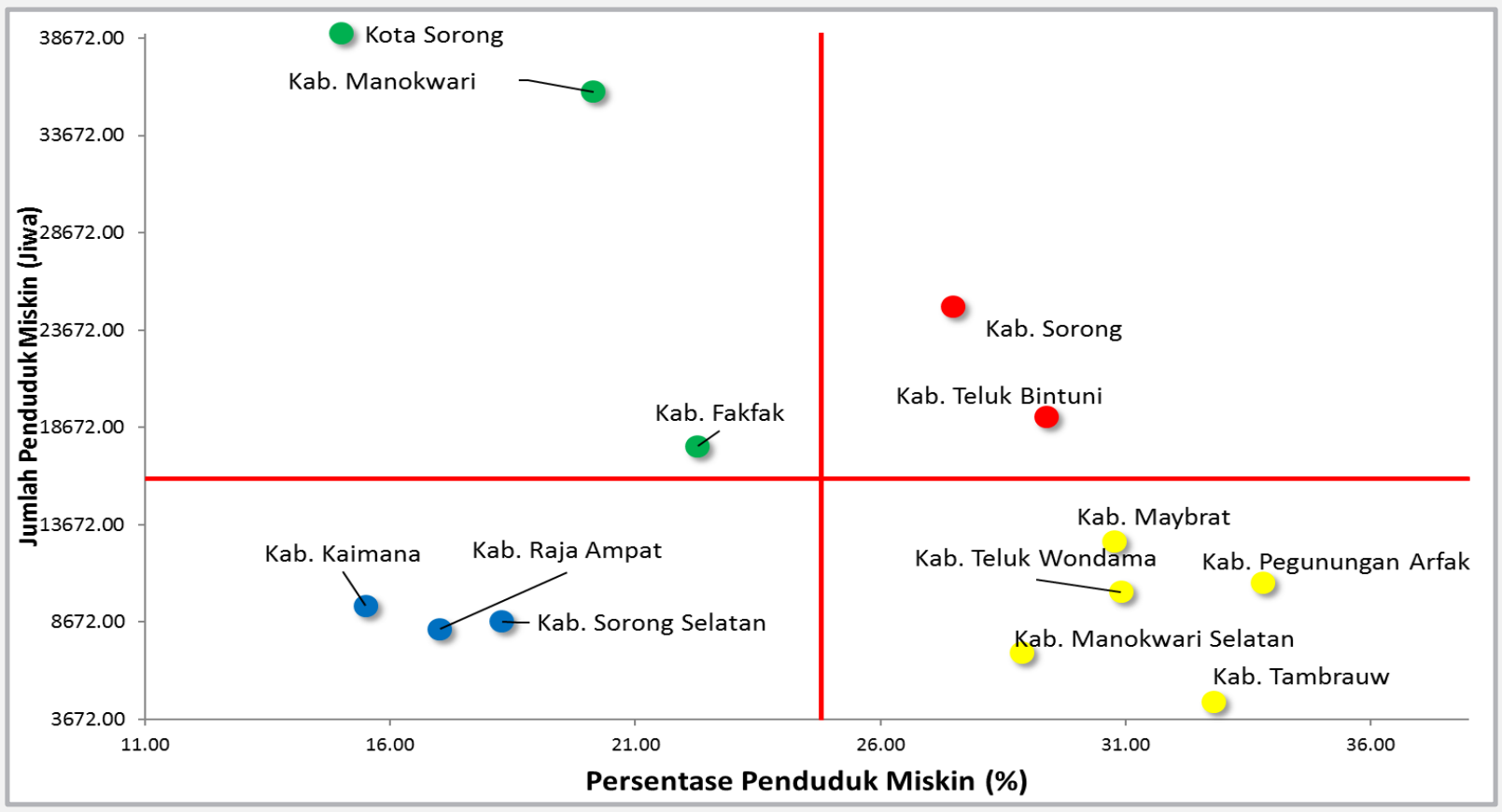

Sumber: Susenas Maret 2020, BPS (diolah)

Analisa APBD di Papua (1)

- Hampir seluruh kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tinggi di Papua memiliki derajat otonomi fiskal yang rendah.
- Derajat otonomi fiskal dinyatakan oleh porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam keseluruhan pendapatan daerah.
- Artinya semakin rendah derajat otonomi fiskal suatu daerah semakin kecil pula porsi PAD dalam keseluruhan pendapatan suatu daerah. Hal ini berimplikasi pada semakin tingginya ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dari pusat.
- Sebagai contoh: Kabupaten Tolikara (Gambar 11) yang berada pada kuadran 2 (kanan bawah) dikategorikan sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi (di atas rata-rata) serta memiliki derajat ononomi fiskal rendah (di bawah rata-rata).

21

Gambar 11. Distribusi Kabupaten/Kota di Papua Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Derajat Otonomi Fiskal

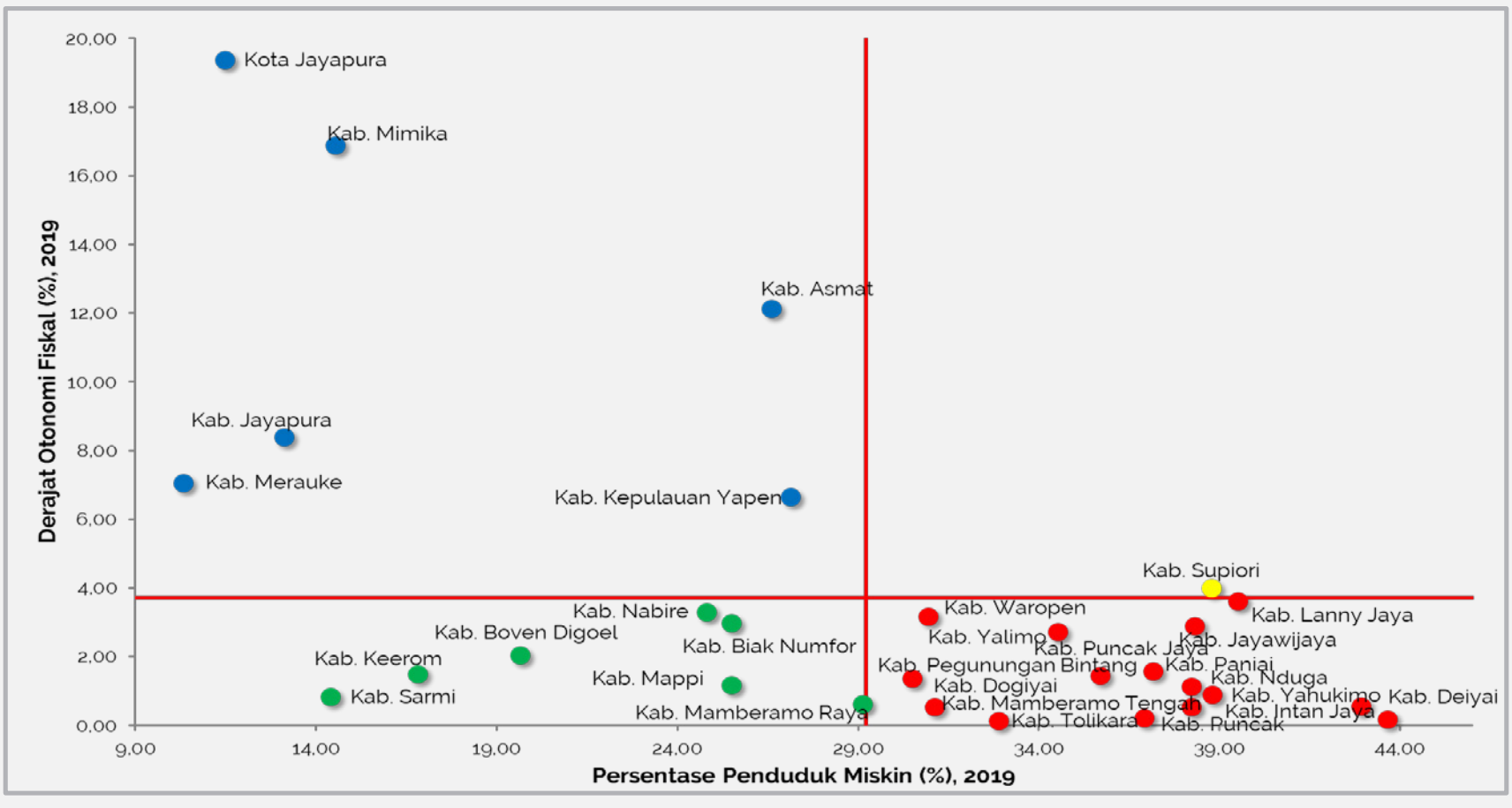

Sumber: Kemenkeu dan BPS, 2019 (diolah)

22

Analisa APBD di Papua (2)

- Separuh dari kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tinggi dan memiliki derajat otonomi fiskal rendah di Papua ternyata memiliki ruang fiskal yang cukup lebar.
- Ruang fiskal suatu daerah dinyatakan sebagai total pendapatan daerah dikurangi pendapatan hibah, pendapatan yang sudah diatur peruntukannya (yaitu DAK, dana Otsus, dana penyesuaian, dan dana darurat), dan belanja wajib yang sifatnya mengikat (belanja pegawai dan belanja bunga); kemudian dibagi dengan total pendapatan daerah.
- Artinya, semakin besar ruang fiskal suatu daerah semakin besar pula peluang Pemerintah Daerah untuk membiayai prioritas kebijakannya, seperti halnya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.
- Sebagai contoh: Kabupaten Tolikara (Gambar 12) yang berada pada kuadran 1 (kanan atas) dikategorikan sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi (di atas rata-rata) serta memiliki ruang fiskal tinggi/besar (di atas rata-rata).

23

Gambar 12. Distribusi Kabupaten/Kota di Papua Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Ruang Fiskal

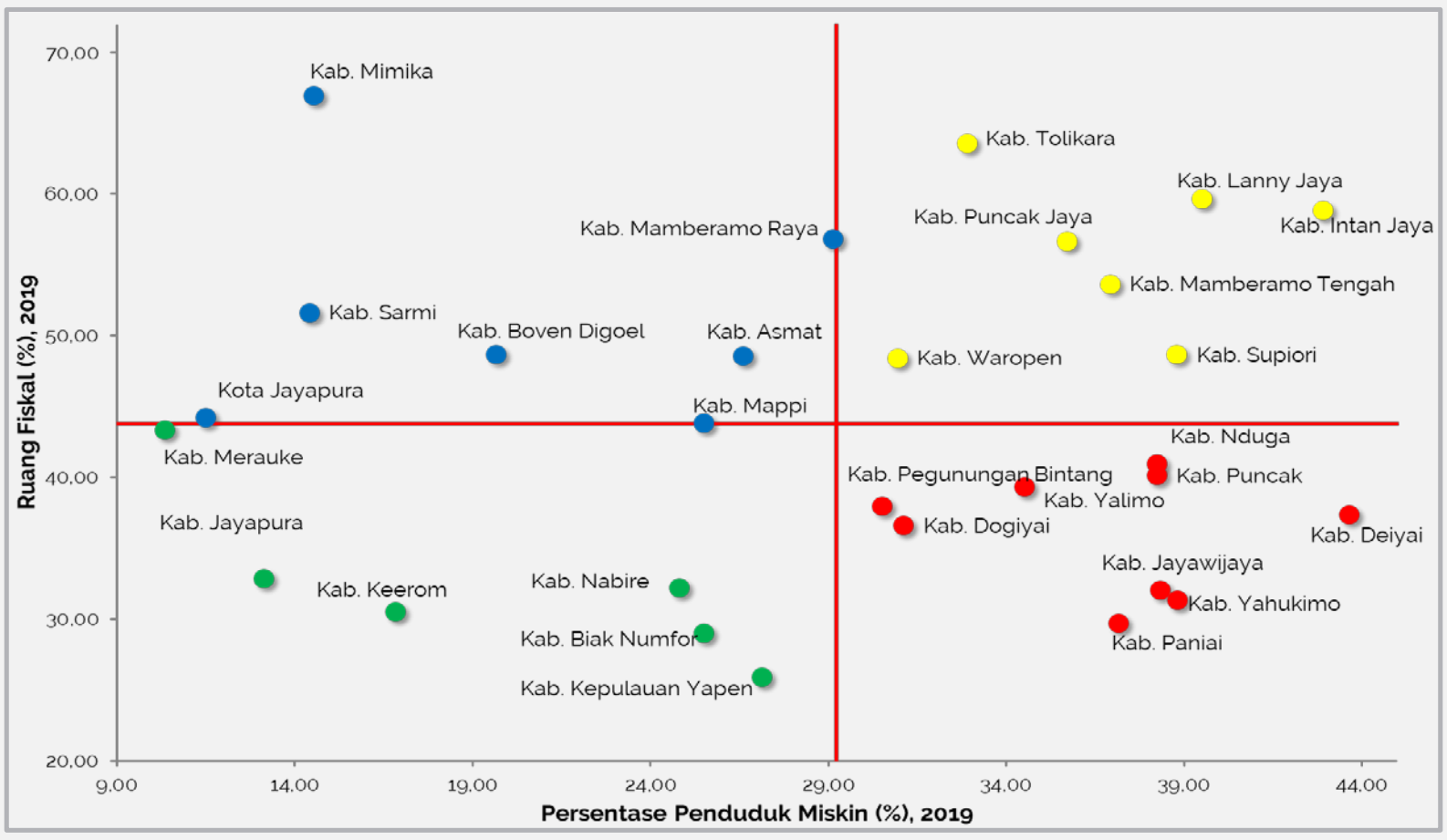

Sumber: Kemenkeu dan BPS, 2019 (diolah)

24

Analisa APBD di Papua (3)

- Namun demikian, untuk bidang-bidang yang berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum), porsi alokasi daerah-daerah tersebut umumnya masih sangat rendah di bawah rata-rata dari keseluruhan daerah di provinsi yang bersangkutan.
- Sebagai contoh: Kabupaten Tolikara (Gambar 13) yang berada pada kuadran 2 (kanan bawah) dikategorikan sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi (di atas rata-rata) serta porsi belanja kesejahteraan yang rendah (di bawah rata-rata).

25

Gambar 13. Distribusi Kabupaten/Kota di Papua Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Kesejahteraan

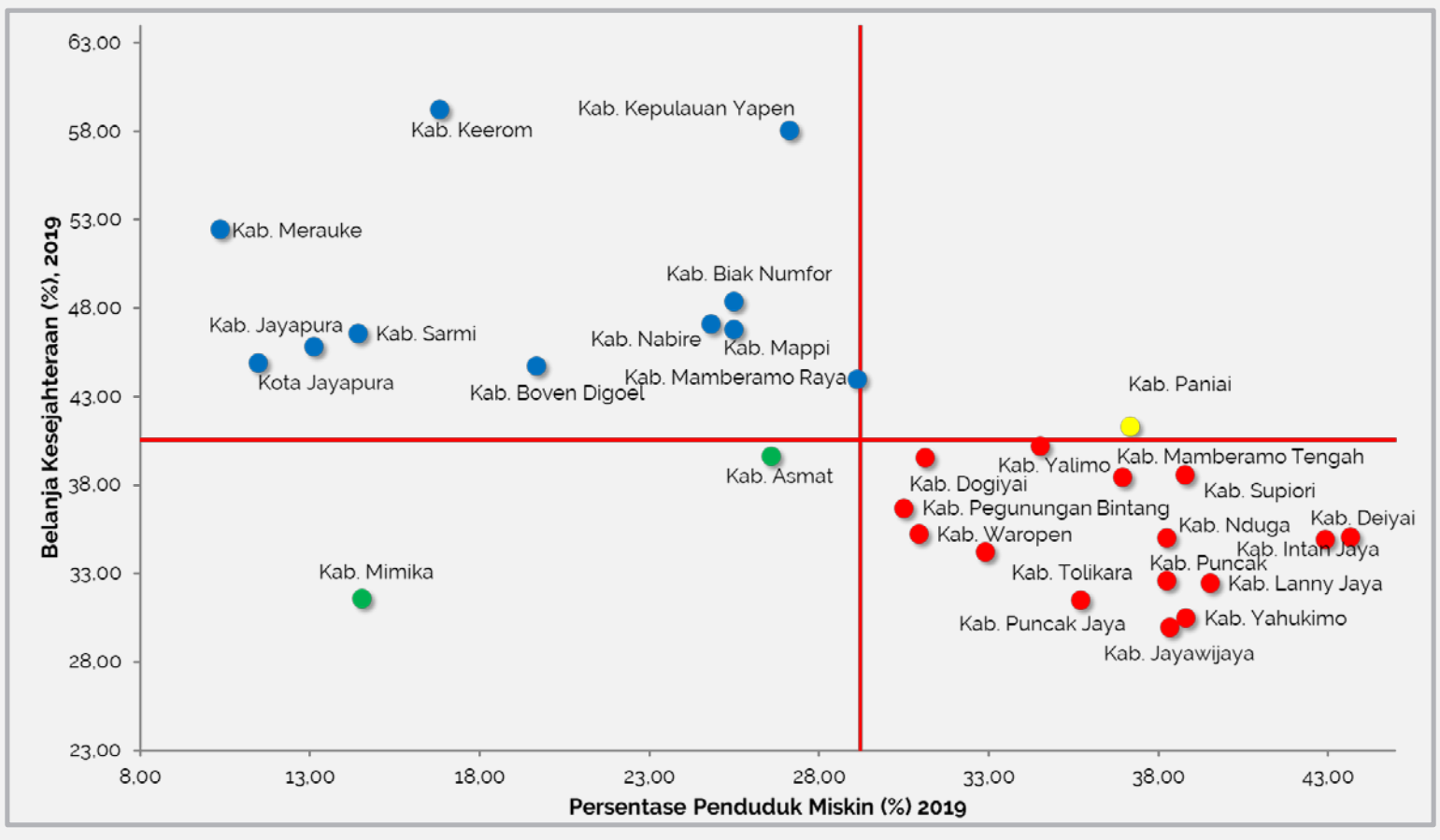

Sumber: Kemenkeu dan BPS, 2019 (diolah)

26

Analisa APBD di Papua Barat (1)

- Hampir seluruh kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tinggi di Papua Barat memiliki derajat otonomi fiskal yang rendah.
- Sebagai contoh: Kabupaten Teluk Bintuni (Gambar 14) yang berada pada kuadran 2 (kanan bawah) dikategorikan sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi (di atas rata-rata) serta memiliki derajat ononomi fiskal rendah (di bawah rata-rata).

27

Gambar 14. Distribusi Kabupaten/Kota di Papua Barat Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Derajat Otonomi Fiskal

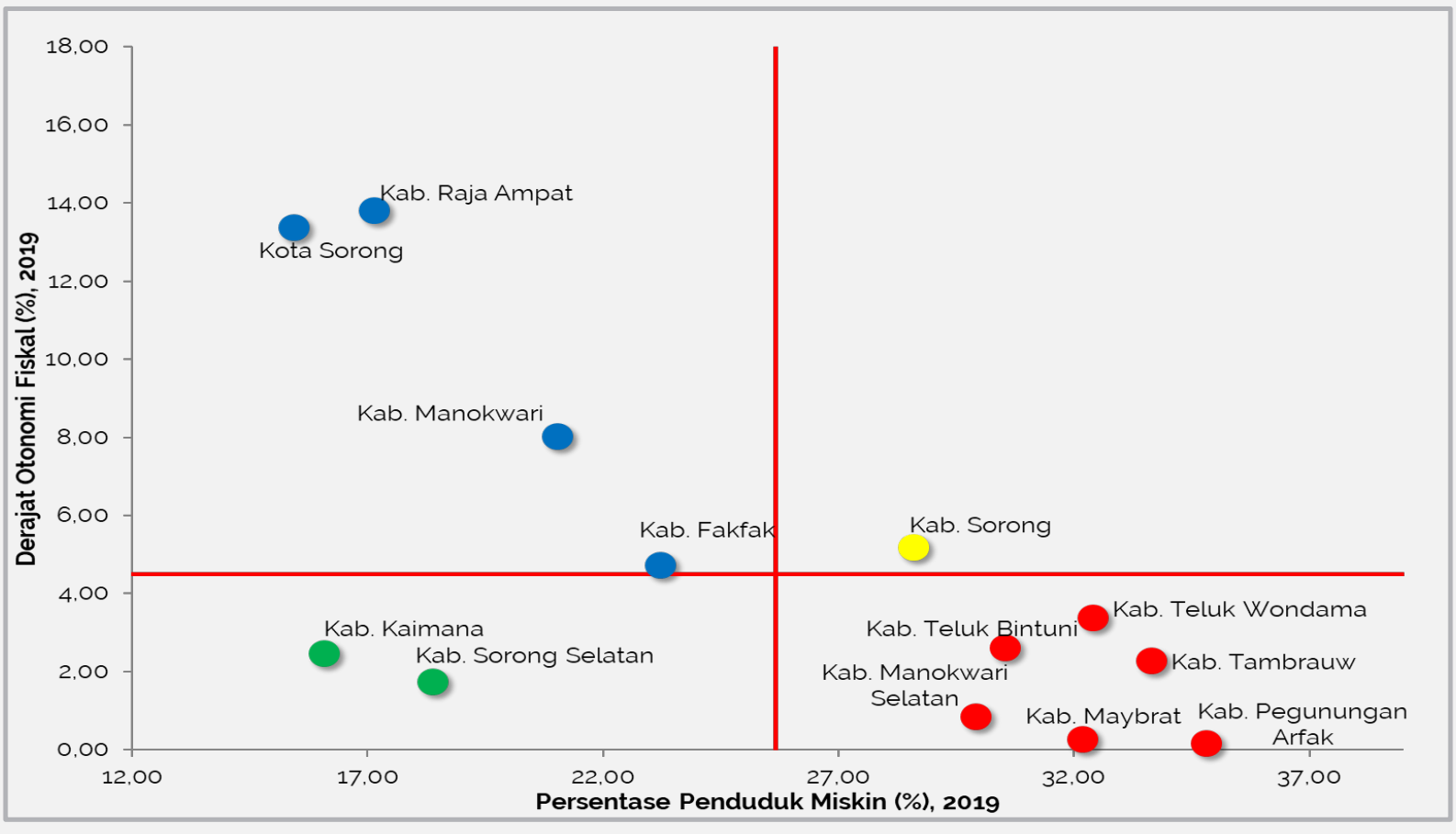

Sumber: Kemenkeu dan BPS, 2019 (diolah)

28

Analisa APBD di Papua Barat (2)

- Separuh dari kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tinggi yang memiliki derajat otonomi fiskal rendah di Papua Barat ternyata memiliki ruang fiskal yang cukup lebar.
- Sebagai contoh: Kabupaten Teluk Bintuni (Gambar 15) yang berada pada kuadran 1 (kanan atas) dikategorikan sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi (di atas rata-rata) serta memiliki ruang fiskal tinggi (di atas rata-rata).

29

Gambar 15. Distribusi Kabupaten/Kota di Papua Barat Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Ruang Fiskal

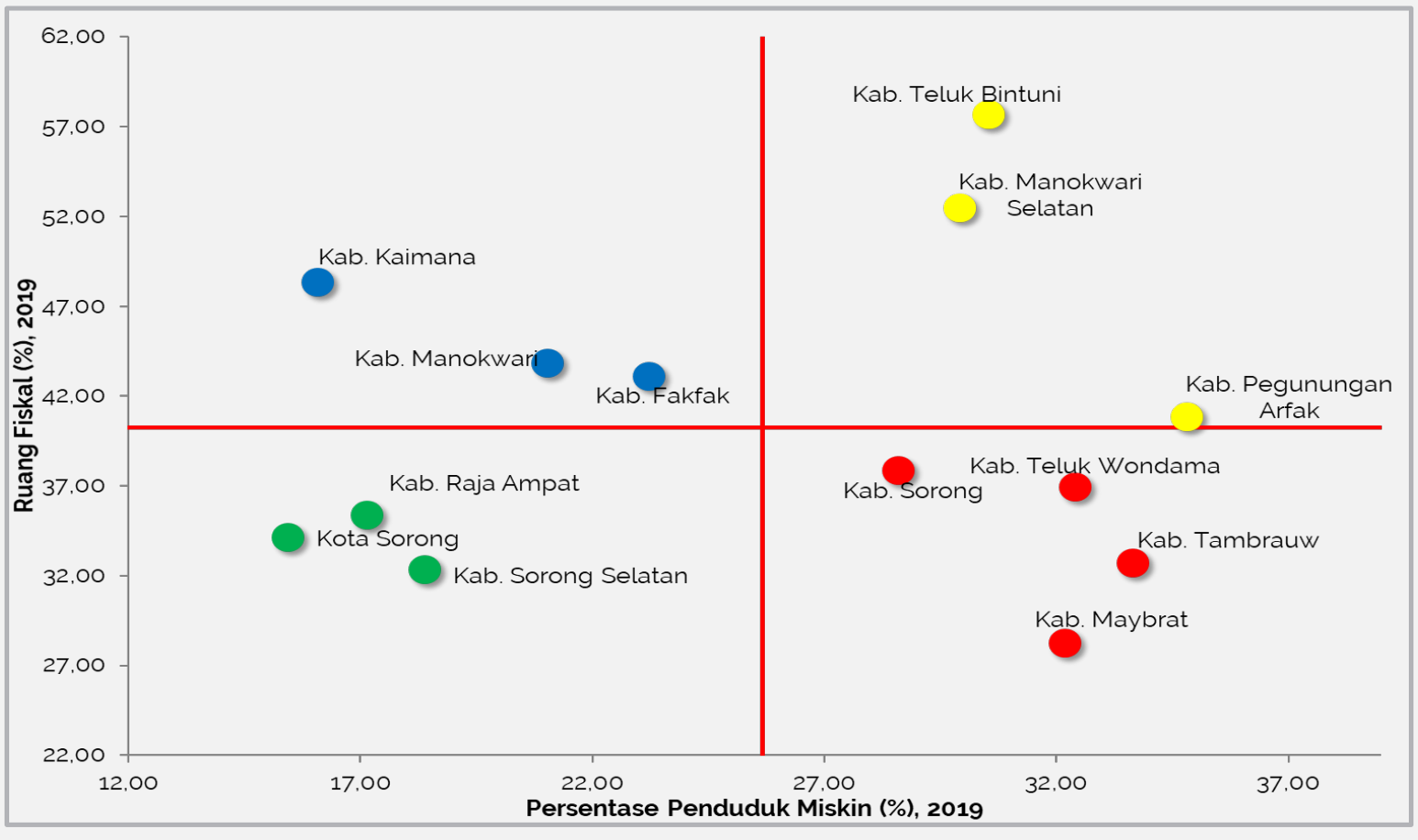

Sumber: Kemenkeu dan BPS, 2019 (diolah)

30

Analisa APBD di Papua Barat (3)

- Sedikit berbeda dengan pengalaman Papua, kabupaten/kota di Papua Barat yang dimaksud sebelumnya memiliki kemampuan relatif lebih tinggi dalam mengalokasikan anggaran belanja dalam bidang-bidang kunci penanggulangan kemiskinan.
- Sebagai contoh: Kabupaten Teluk Bintuni (Gambar 16) yang berada pada kuadran 1 (kanan atas) dikategorikan sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi (di atas rata-rata) namun memiliki porsi belanja kesejahteraan yang tinggi pula (di atas rata-rata).

31

Gambar 16. Distribusi Kabupaten/Kota di Papua Barat Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Kesejahteraan

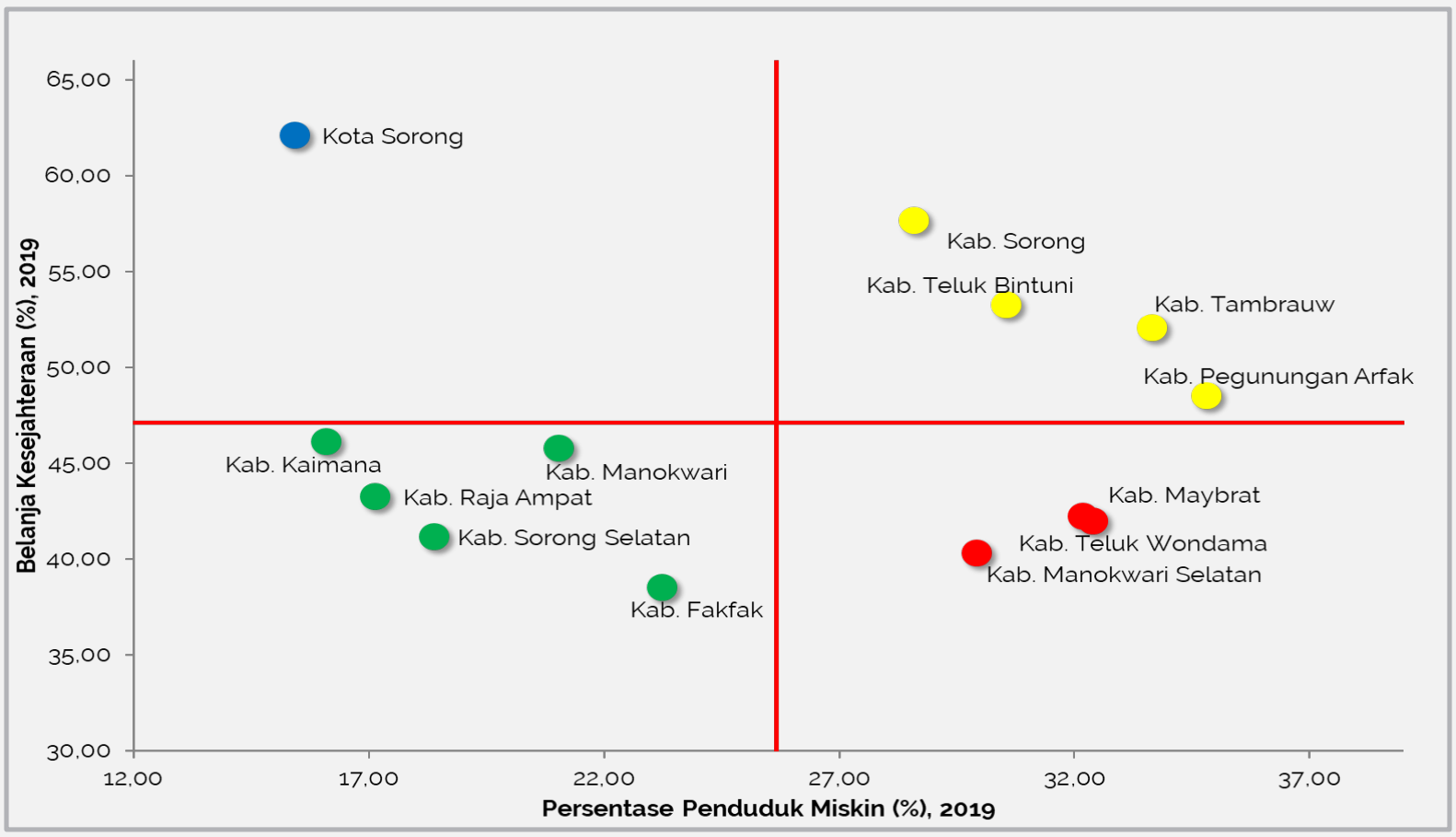

Sumber: Kemenkeu dan BPS, 2019 (diolah)

32

2 | Pendidikan

33

Pendidikan (1)

- Hampir seluruh capaian indikator pendidikan di Papua dan Papua Barat berada di bawah capaian nasional. Pada saat yang sama, capaian indikator pendidikan di Papua Barat lebih baik dibandingkan dengan Papua.
- Terdapat dua indikator utama yang perlu mendapat perhatian lebih mengingat perbedaan capaian yang sangat besar dibandingkan dengan capaian nasional, yaitu angka buta buruf (15+) dan Angka Putus Sekolah.
- Pada tahun 2019, masih terdapat 21,8 persen penduduk Papua yang tidak bisa membaca dan menulis, serta tingginya angka putus sekolah di Papua untuk setiap tingkatan usia.
- Jika hal ini tidak segera ditangani dengan serius, niscaya akan menciptakan sumber daya manusia Papua yang tidak unggul dan memiliki daya saing tinggi.

34

Tabel 3. Karakteristik Pendidikan, 2019

Indikator	Papua	Papua Barat	Indonesia
Rata-Rata Lama Sekolah (15+) (tahun)	6,37	8,47	7,85
Angka Buta Huruf (15+) (%)	21,8	4,3	4,6
Angka Partisipasi Kasar (%) :			
SD	94,31	115,21	106,73
SMP	76,47	83,53	91,16
SMA	64,39	75,68	80,80
Angka Partisipasi Murni (%) :			
SD	80,42	93,91	96,98
SMP	56,17	63,20	78,78
SMA	43,86	53,98	62,00
Angka Putus Sekolah (%) :			
Umur 7-12 tahun	19,56	3,35	0,87
Umur 13-15 tahun	24,47	5,28	4,74
Umur 16-18 tahun	55,86	25,60	36,16

Sumber: Susenas Maret 2019, BPS (diolah)

35

Pendidikan (2)

- Tingginya indikator kepala rumah tangga yang tidak bersekolah serta rendahnya tingkat kelulusan kepala keluarga hampir di setiap jenjang pendidikan menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan rumah tangga di Papua.
- Namun demikian, masih terdapat kepala rumah tangga di Papua dan Papua Barat yang lulus perguruan tinggi, masing-masing sebesar 9,2 persen dan 17,2 persen.

36

Tabel 4. Karakteristik Pendidikan Kepala Rumah Tangga, 2019 (Persen)

Kepala Rumah Tangga	Papua	Papua Barat	Indonesia
Tidak bersekolah	38,0	13,8	21,5
Lulus SD	15,9	20,1	28,5
Lulus SMP	12,6	14,8	16,1
Lulus SMA	24,1	34,0	25,1
Lulus PT	9,2	17,2	8,8

Sumber: Susenas Maret 2019, BPS (diolah)

37

Pendidikan (3)

- Sekitar 35 persen kabupaten/kota di Papua memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan angka partisipasi sekolah SD/MI yang rendah. Bahkan lebih dari separuh kabupaten/kota tersebut masih dihadapkan dengan permasalah kesulitan dalam mengakses sekolah.
- Sebagai contoh:
  - Kabupaten Yahukimo (Gambar 17) yang berada pada kuadran 2 (kanan bawah) adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi (di atas rata-rata) dan memiliki angka partisipasi murni SD/MI rendah (di bawah rata-rata).
  - Pada saat yang sama, Kabupaten Yahukimo (Gambar 18) berada pada kuadran 3 (kiri bawah) yang masuk dalam kategori angka partisipasi sekolah rendah (di bawah rata-rata) dan akses menuju ke sekolah SD/MI yang sulit (di bawah rata-rata).

38

Gambar 17. Kemiskinan dan Partisipasi Pendidikan SD/MI di Papua

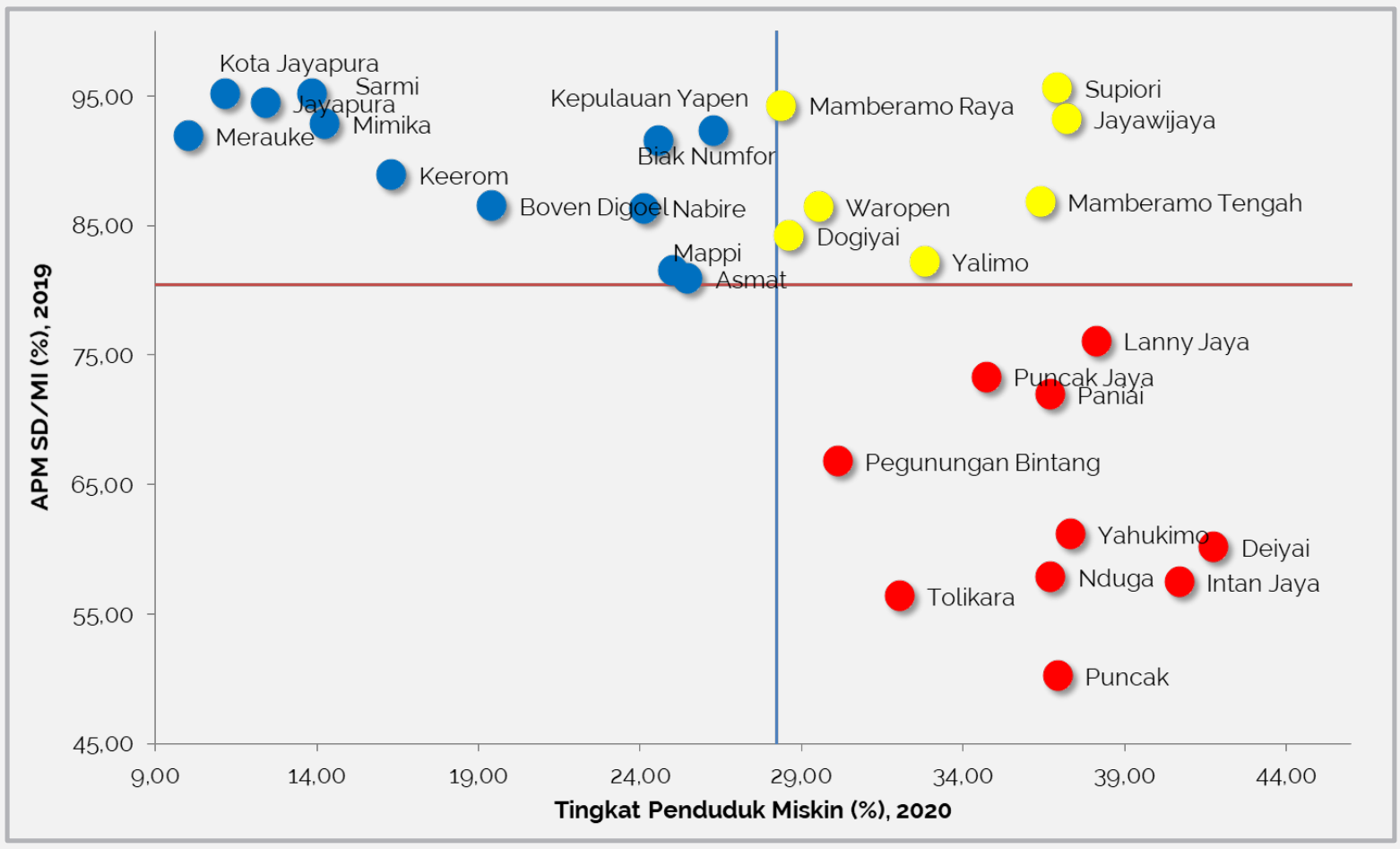

Sumber: BPS (diolah)

Gambar 18. Partisipasi Pendidikan dan Akses ke Sekolah SD/MI di Papua

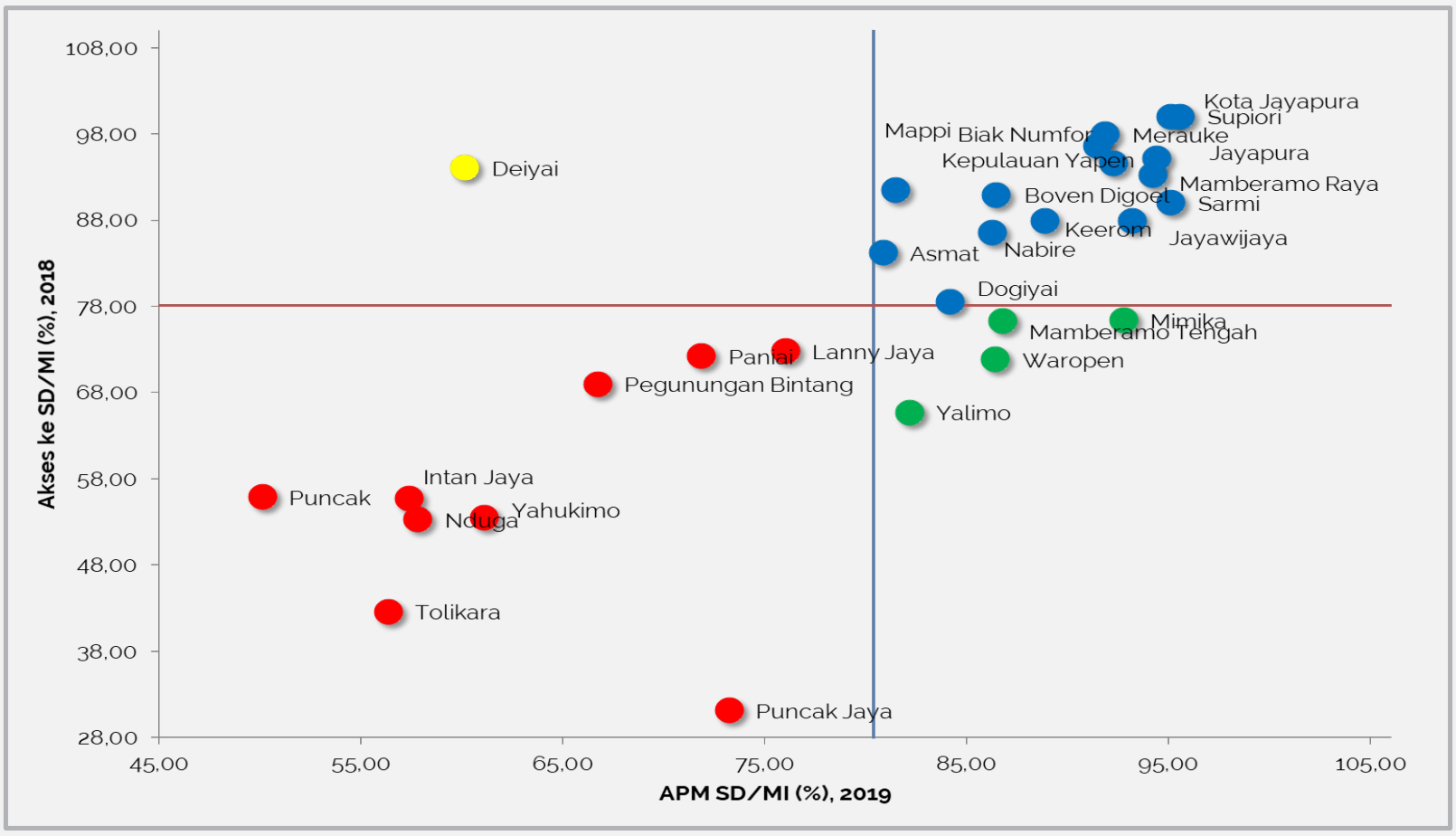

Sumber: BPS (diolah)

Pendidikan (4)

- Sekitar 38 persen kabupaten/kota di Papua Barat memiliki angka partisipasi sekolah SD/MI yang tinggi dan tingkat kemiskinan tinggi. Bahkan lebih dari separuh kabupaten/kota tersebut harus menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas pendidikan.
- Sebagai contoh:
  - Kabupaten Maybrat (Gambar 19) yang berada pada kuadran 1 (kanan atas) adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi (di atas rata-rata) dan angka partisipasi murni SD/MI tinggi (di atas rata-rata).
  - Pada saat yang sama, Kabupaten Maybrat (Gambar 20) yang terletak pada kuadran 2 (kanan bawah) masuk dalam kategori angka partisipasi sekolah SD/MI tinggi (di atas rata-rata) dan akses menuju ke sekolah SD/MI yang sulit (di bawah rata-rata).

41

Gambar 19. Kemiskinan dan Partisipasi Pendidikan SD/MI di Papua Barat

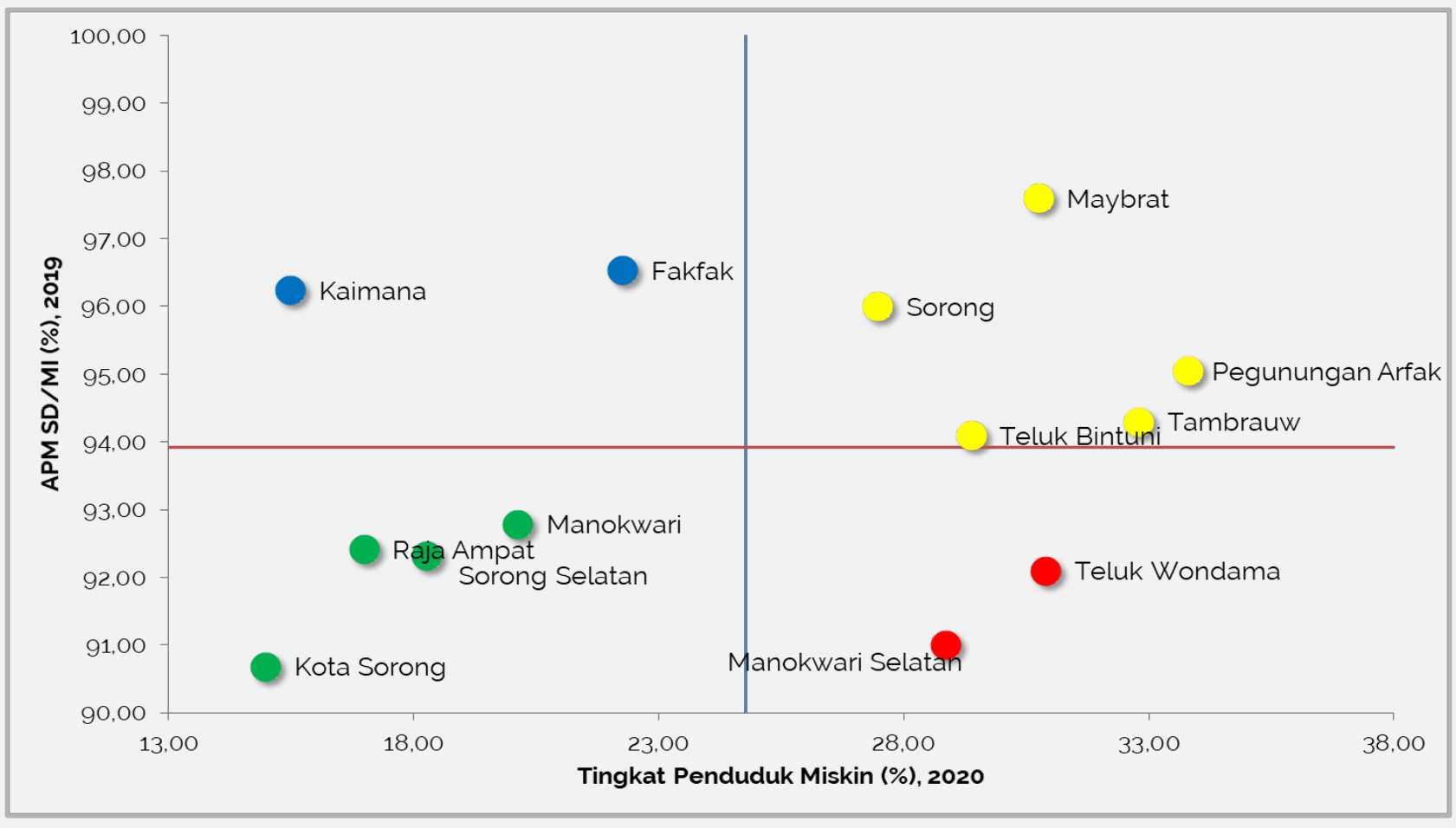

Sumber: BPS (diolah)

42

Gambar 20. Partisipasi Pendidikan dan Akses ke Sekolah SD/MI di Papua Barat

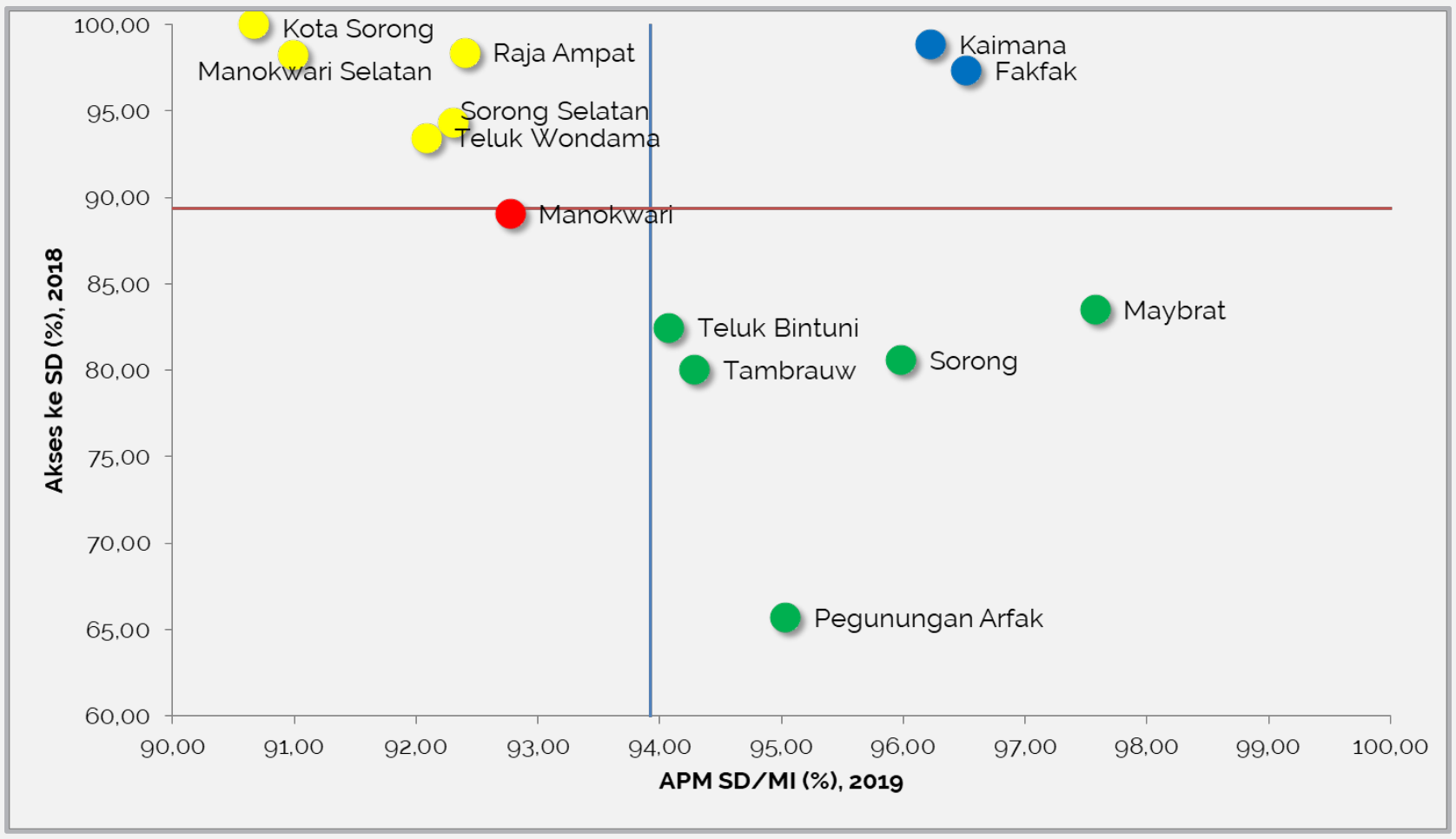

Sumber: BPS (diolah)

43

3 Kesehatan

44

Kesehatan (1)

- Prevalensi balita kerdil (*stunting*) di Papua dan Papua Barat menurun di tahun 2018 dibandingkan 2013. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018 menunjukkan angka prevalensi anak *stunting* di Papua tahun 2018 turun sebesar 16,9 poin dibandingkan tahun 2013, sementara Papua Barat turun sebesar 7,2 poin.
- Namun demikian, masih terdapat 55 persen atau 16 dari 29 kabupaten di Papua (Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Paniai, Puncak Jaya, Boven Digoel, Mappi, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Keerom, Waropen, Supiori, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Dogiyai, Intan Jaya) yang memiliki angka prevalensi *stunting* diatas angka provinsi.
- Pada saat yang sama, masih terdapat 61,5 persen atau 8 dari 13 kabupaten di Papua Barat (Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak) yang memiliki angka prevalensi *stunting* di atas angka provinsi.
- Desa/kelurahan di Papua dan Papua Barat cenderung masih mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, baik Rumah Sakit Bersalin maupun Puskesmas yang sudah diupayakan oleh pemerintah.

46

Gambar 21. Prevalensi Balita Kerdil (*Stunting*) Berdasarkan Provinsi, 2013-2018

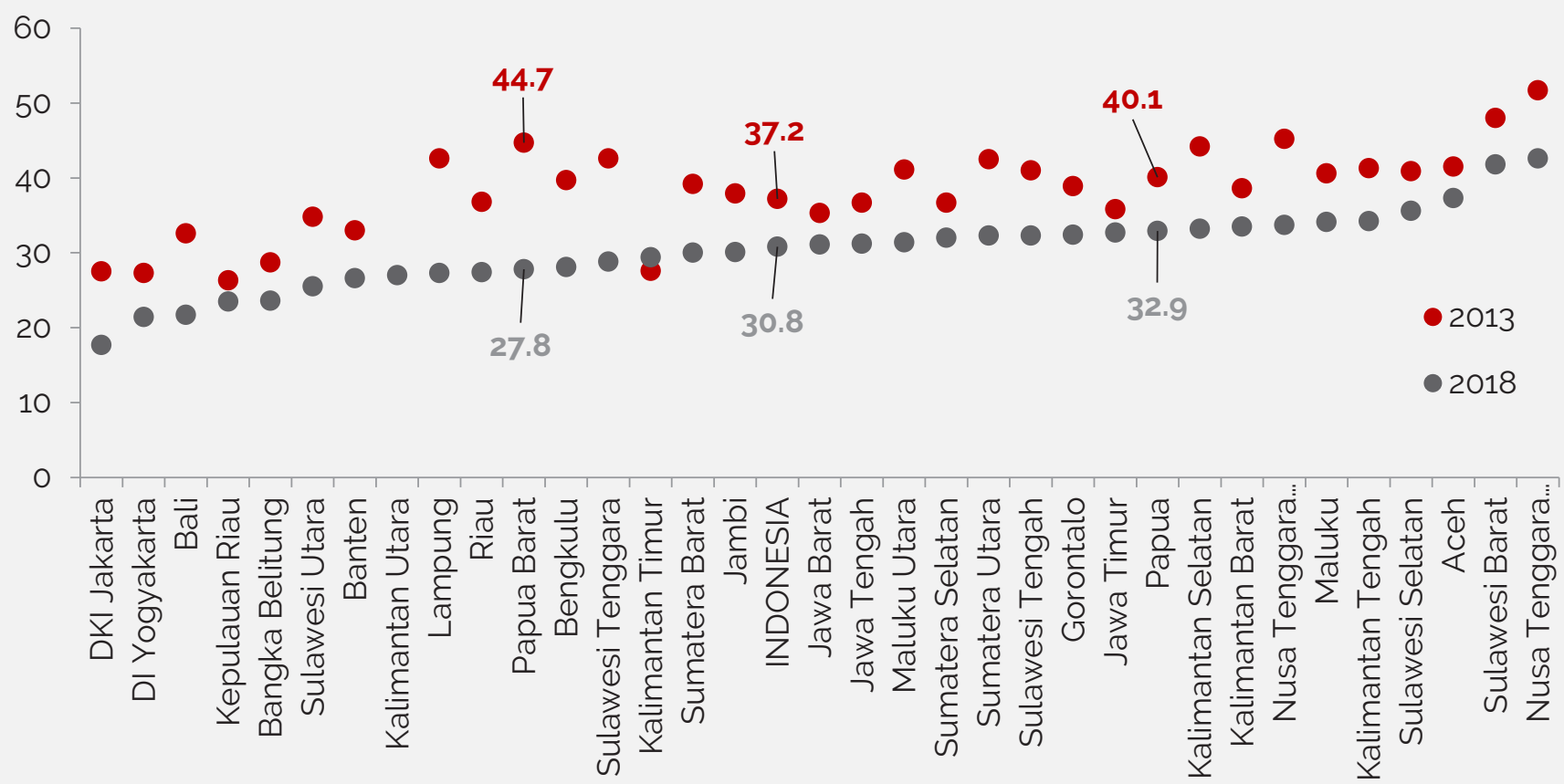

Sumber: Riskesdas 2013-2018, (diolah Balitbangkes)

46

Tabel 5. Akses Fasilitas Kesehatan, 2018 (Persen)

Kemudahan Akses Desa/Kelurahan Menuju	Papua	Papua Barat	Nasional
Rumah Sakit	22,4	24,0	69,1
Rumah Sakit Bersalin	4,9	3,9	46,6
Puskesmas	30,9	44,4	81,1
Poliklinik swasta	16,5	18,7	67,5

Sumber: Podes 2018, BPS (diolah)

47

Kesehatan (2)

- Keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk miskin terjadi di sekitar 24 persen kabupaten/kota di Papua. Dan hampir seluruh kabupaten/kota tersebut menghadapi kesulitan akses menuju layanan kesehatan.
- Sebagai contoh:
  - Kabupaten Nduga (Gambar 22) yang berada pada kuadran 1 (kanan atas) adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi (di atas rata-rata) dan angka keluhan kesehatan tinggi (di atas rata-rata).
  - Pada saat yang sama, Kabupaten Nduga (Gambar 23) yang terletak pada kuadran 2 (kanan bawah) masuk dalam kategori keluhan kesehatan tinggi (di atas rata-rata) dan akses menuju ke Poskesdes/Polindes yang tinggi/sulit (di bawah rata-rata).

48

Gambar 22.
Kemiskinan dan Keluhan Kesehatan di Papua

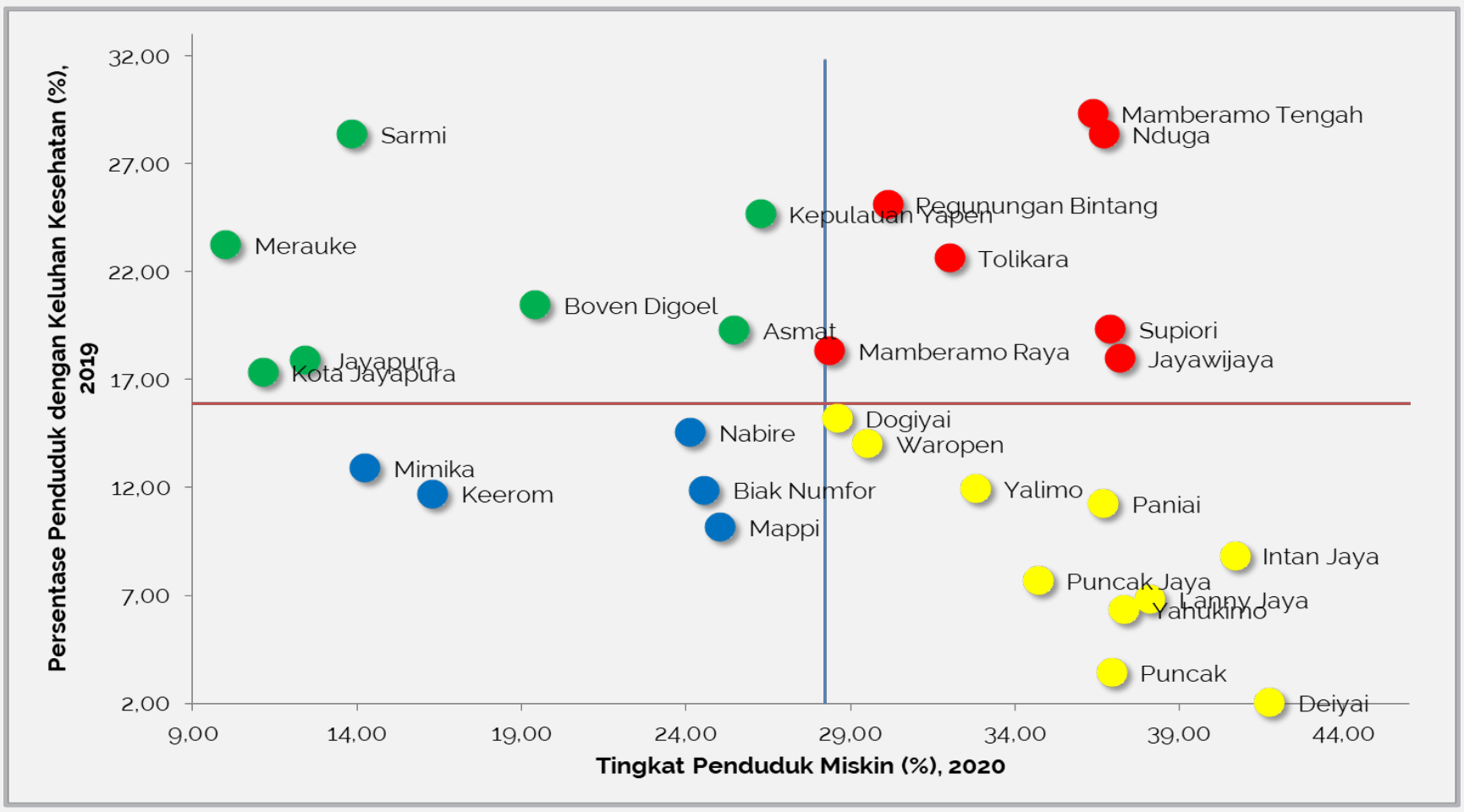

Sumber: BPS (diolah)

Gambar 23. Keluhan Kesehatan dan Akses Layanan Kesehatan di Papua

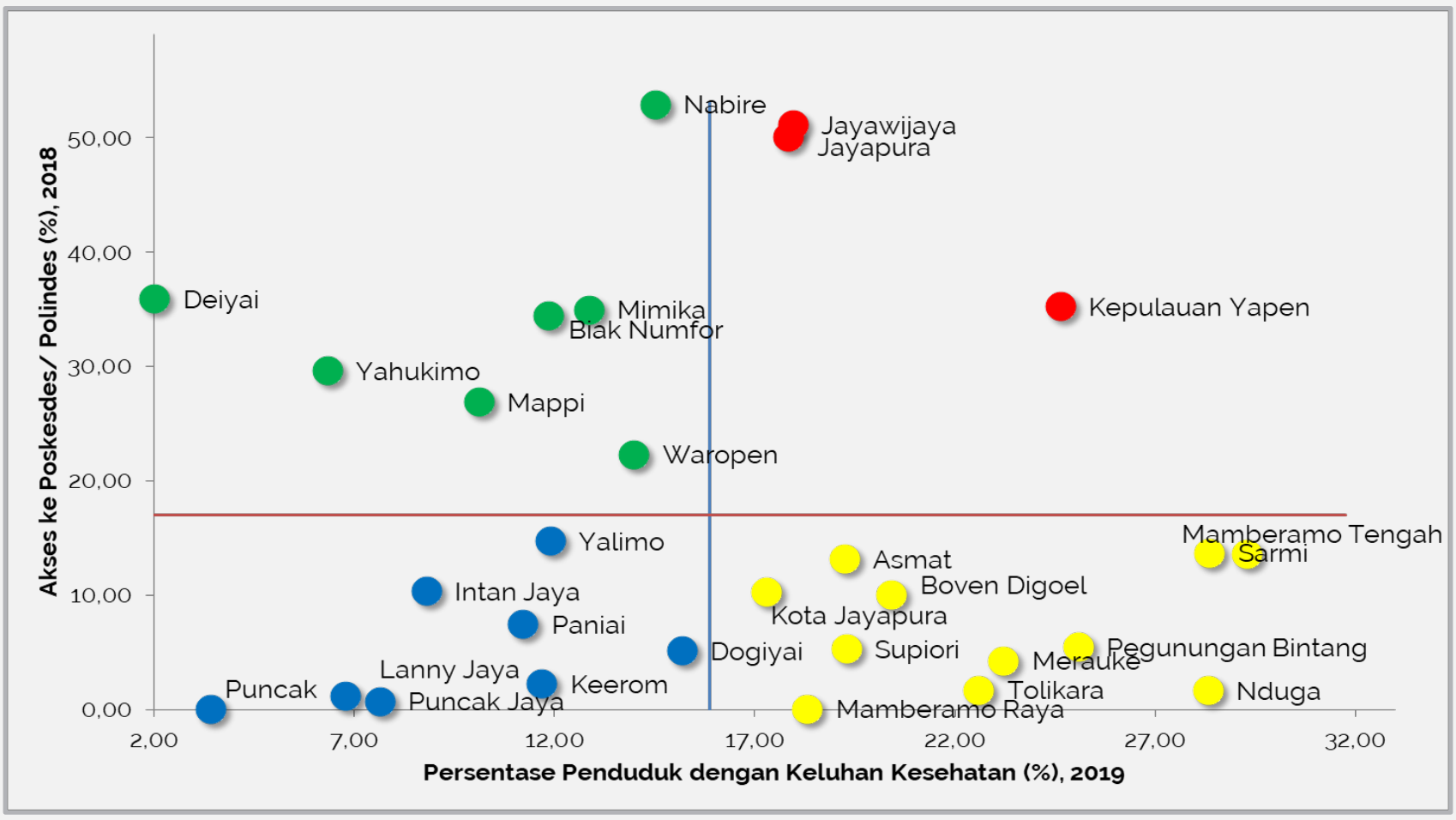

Sumber: BPS (diolah)

Kesehatan (3)

- Penduduk miskin yang berobat jalan terdapat di sekitar 38 persen kabupaten/kota di Papua Barat. Dan hampir seluruh kabupaten/kota tersebut menghadapi kesulitan akses menuju layanan kesehatan.
- Sebagai contoh:
  - Kabupaten Tambraw (Gambar 24) yang berada pada kuadran 1 (kanan atas) adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi (di atas rata-rata) dan persentase penduduk berobat jalan yang tinggi (di atas rata-rata).
  - Pada saat yang sama, Kabupaten Tambraw (Gambar 25) yang terletak pada kuadran 2 (kanan bawah) adalah kabupaten dengan angka berobat jalan penduduk tinggi (di atas rata-rata) serta akses menuju ke Poskesdes/Polindes yang tinggi/sulit (di bawah rata-rata).

51

Gambar 24. Kemiskinan dan Penduduk yang Berobat Jalan di Papua Barat

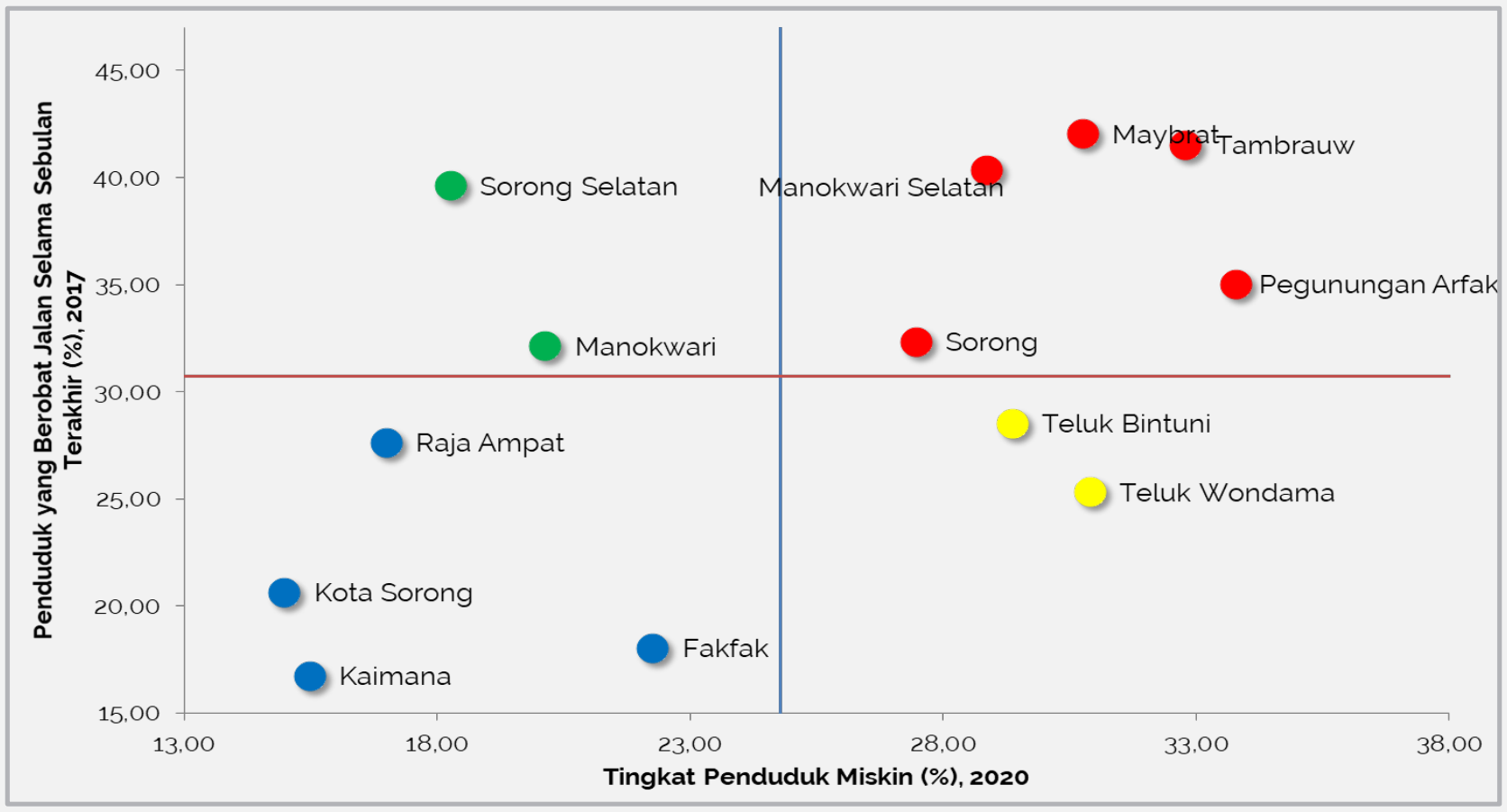

Sumber: BPS (diolah)

52

Gambar 25. Penduduk yang Berobat Jalan dan Akses Layanan Kesehatan di Papua Barat

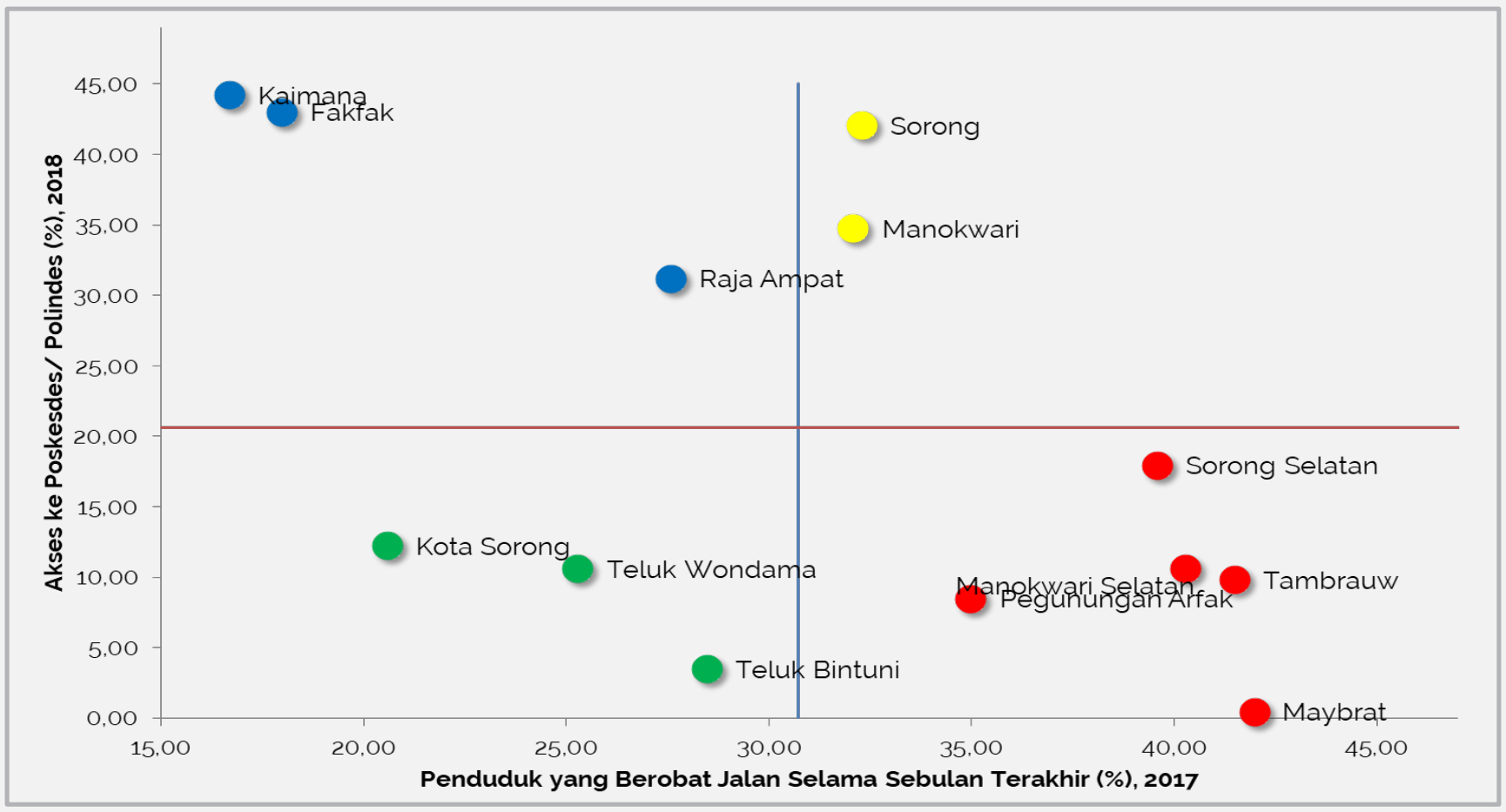

Sumber: BPS (diolah)

4 Usaha Mikro Kecil

Usaha Mikro Kecil

- Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat total penyaluran pembiayaan/kredit usaha UMK di Papua dan Papua Barat untuk jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) berada pada kisaran angka Rp. 1,778 triliun dari total penyaluran Rp. 151,73 triliun se-Indonesia.
- Sementara Kementerian Koperasi dan UKM mencatat total penyaluran pinjaman oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) kepada UMK di Papua dan Papua Barat hanya sekitar Rp. 71 miliar dari total penyaluran Rp. 11,9 triliun se-Indonesia.
- Rendahnya angka penyaluran pembiayaan/kredit usaha ini diperkirakan terjadi karena UMK di Papua dan Papua Barat yang sudah mengakses pembiayaan/kredit usaha tidak lebih dari 17 persen.

55

Tabel 6. Penyaluran Pembiayaan/Kredit, 2020 (Triliun Rupiah)

Keterangan	Papua	Papua Barat	Indonesia
Kredit Usaha Rakyat per Oktober 2020	0,89	0,88	151,73
Kredit Mekaar – PNM per 12 Desember 2020	0,017	0,015	22,8
Kredit UMi per Mei 2020	0,004	0,003	6,64
Pinjaman oleh LPDB per Oktober 2020	0,012	0,059	11,9

Sumber: Berbagai publikasi diolah

56

5 Ketenagakerjaan

57

Ketenagakerjaan (1)

- Papua dan Papua Barat memiliki potensi tenaga kerja yang sangat melimpah.
- Data demografi tahun 2019 menunjukkan lebih dari 70 persen anggota rumah tangga di Papua dan Papua Barat merupakan kelompok usia produktif.
- Kondisi ini didukung oleh umur kepala rumah tangga yang tergolong berusia muda (di bawah angka nasional) serta jumlah anggota rumah tangga lebih banyak dibanding angka nasional.

58

Tabel 7. Kondisi Demografi Rumah Tangga, 2019 (Persen)

Karakteristik	Papua	Papua Barat	Indonesia
Usia Kepala Rumah Tangga (Tahun)	42,79	44,91	48,38
Jumlah Anggota Rumah Tangga (Orang)	3,77	4,28	3,74
Anggota Rumah Tangga: • Usia Sekolah • Usia Produktif	 26,31 72,82	 25,71 70,44	 23,96 69,03
Kepala Rumah Tangga Perempuan	8,69	11,54	15,46

Sumber: Susenas Maret 2019, BPS (diolah)

59

Ketenagakerjaan (2)

- Dibanding tahun 2019, angka pengangguran terbuka di Papua dan Papua Barat 2020 menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi persentase maupun jumlah.
- Hal ini menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk Papua dan Papua Barat yang tidak bekerja dibanding dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia.

60

Tabel 8. Tingkat Pengangguran, 2019-2020

Keterangan	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)			Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Ribu Orang)		
	2019	2020		2019	2020	
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus	Februari	Agustus
Papua	3,51	3,42	4,28	65,14	62,89	75,66
Papua Barat	6,43	6,78	6,80	29,99	32,76	33,50
Indonesia	5,23	4,94	7,07	7.104,4	6.925,5	9.767,8

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020, BPS (diolah)

61

Ketenagakerjaan (3)

- Khusus untuk kelompok penduduk miskin, lebih dari 60 persen anggota rumah tangganya masuk dalam kategori kelompok usia produktif, dimana mayoritas dari mereka bekerja di sektor informal.
- Dan tidak sedikit pula penduduk miskin di Papua dan Papua Barat yang tidak bekerja.

62

Tabel 9. Status Bekerja Penduduk Miskin (Usia 15+), 2019 (Persen)

Status Bekerja		Papua	Papua Barat
Anggota Rumah Tangga :	Usia Sekolah	37,40	33,08
	Usia Produktif	60,67	60,31
Tidak Bekerja		23,36	41,02
Bekerja di Sektor Informal		70,92	42,50
Bekerja di Sektor Formal		5,73	16,48

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020, BPS (diolah)

6 Infrastruktur

Infrastruktur (1)

- Khusus untuk kelompok penduduk miskin, lebih dari 60 persen 110 kelurahan dan 5.411 kampung (desa) di Papua dan 106 kelurahan dan 1.742 kampung (desa) di Papua Barat memiliki akses transportasi dan fasilitas dasar yang kurang memadai.
- Beberapa hal penting yang perlu dicatat adalah hanya sekitar 18 persen desa/kelurahan di Papua yang dilalui oleh angkutan umum, 10,1 persen menggunakan sumber air minum kemasan/ledeng, 6,4 persen dapat mengakses sinyal telepon seluler dengan kualitas 4G, serta 48 persen sudah menikmati aliran listrik.

65

Tabel 10. Akses Transportasi dan Fasilitas Dasar, 2018 (Persen)

Karakteristik	Papua	Papua Barat	Indonesia
Akses Menuju Desa/Kelurahan			
Ketersediaan jalan yang layak	29,3	47,9	78,9
Desa yang dilalui oleh angkutan umum yang baik	18,0	24,9	42,9
Desa/Kelurahan Memiliki/Menggunakan			
Sumber air minum utama (kemasan/ledeng)	10,1	12,0	36,2
Sinyal telepon seluler yang kuat	31,0	36,4	43,4
Kualitas sinyal: 4G	6,4	14,3	35,9
Fasilitas/layanan pengiriman	5,6	6,7	28,3
Elektrifikasi	48,0	75,0	91,4
Penerangan jalan	19,0	38,1	72,8

Sumber: Podes 2018, BPS (diolah)

66

Infrastruktur (2)

- Tempat tinggal penduduk Papua dan Papua Barat masih jauh dari sebutan layak huni.
- Masih terdapat 27,6 persen rumah tangga di Papua yang tidak menikmati listrik, 19,3 persen rumah berlantai tanah, 24,0 persen rumah tangga tidak memiliki toilet, dan 62,4 persen rumah tangga tidak memiliki akses air minum layak.
- Khusus untuk Papua Barat, masih terdapat 28,7 persen rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan 58,7 persen tidak memiliki akses air minum layak.

67

Tabel 11. Kondisi Perumahan, 2019 (Persen)

Karakteristik	Papua	Papua Barat	Indonesia
RT Tidak Memiliki Rumah	17,9	28,7	19,93
RT Tidak Memiliki Listrik	27,6	5,6	1,15
RT Berlantai Tanah	19,3	1,2	4,42
RT Tidak Memiliki Toilet	24,0	4,7	7,47
RT Tidak Memiliki Akses Air Minum Layak	62,4	58,7	46,2

Sumber: Susenas Maret 2019, BPS (diolah)

68

Infrastruktur (3)

- Kondisi infrastruktur minim di Papua terkonsetrasi di kabupaten/kota yang berada di wilayah pegunungan.
- Hasil pemetaan *Geographic Information System* (GIS) menunjukkan penduduk miskin dan rentan di Papua yang tinggal di kabupaten/kota yang berada di lereng Pegunungan Jaya Wijaya cenderung mengalami kesulitan akses fasilitas dasar yaitu tidak memiliki sumber air minum terlindungi, tidak memiliki listrik, tidak memiliki fasilitas buang air besar, maupun tidak memiliki *septic tank*.

69

Gambar 26. Sebaran Rumah Tangga 40% Terbawah yang Tidak Memiliki Sumber Air Minum Terlindungi di Papua Menurut Kabupaten/Kota, 2015

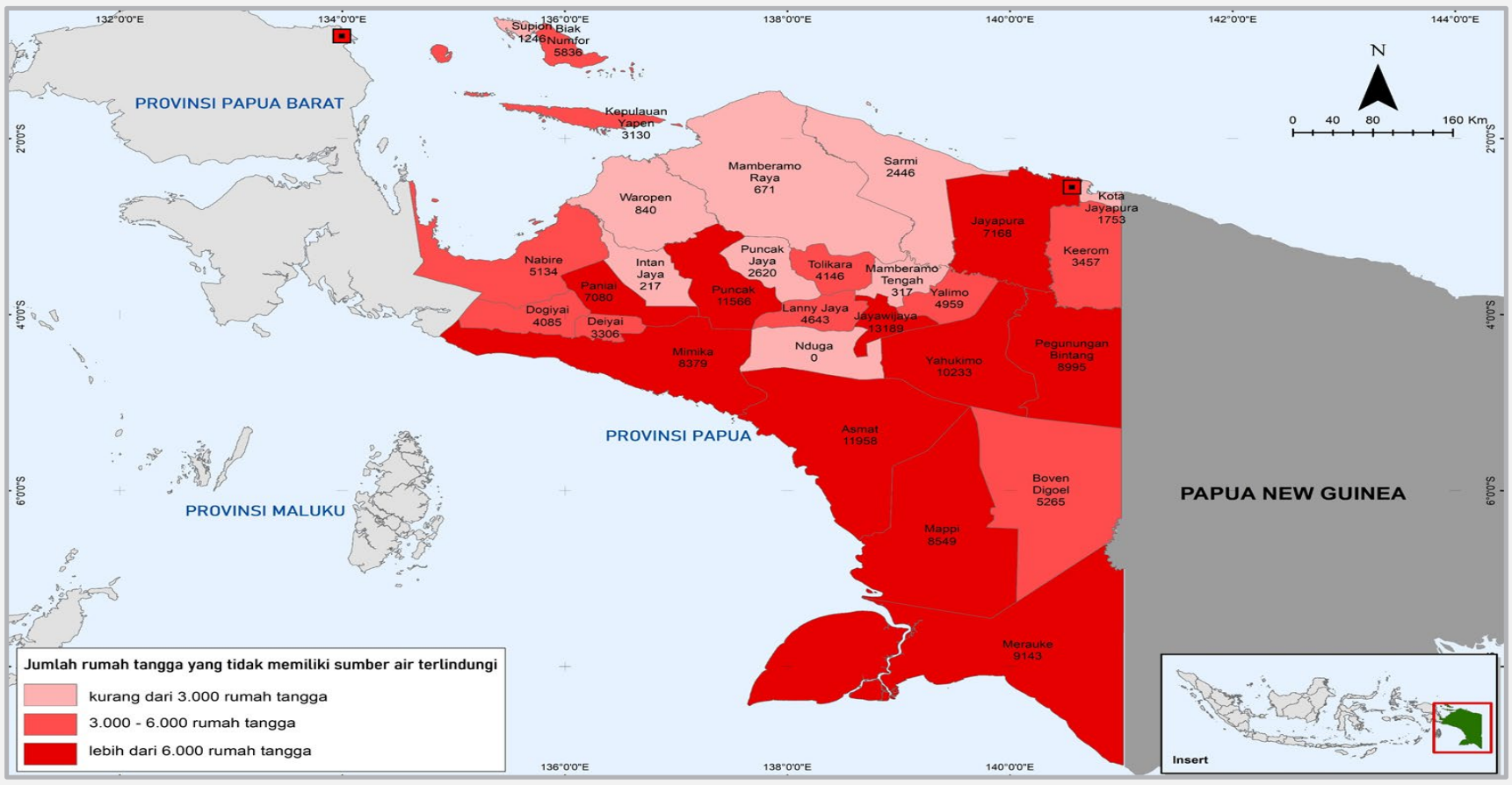

Sumber: PBDT 2015, TNP2K (diolah)

70

Gambar 27. Sebaran Rumah Tangga 40% Terbawah yang Tidak Memiliki Listrik di Papua Menurut Kabupaten/Kota, 2015

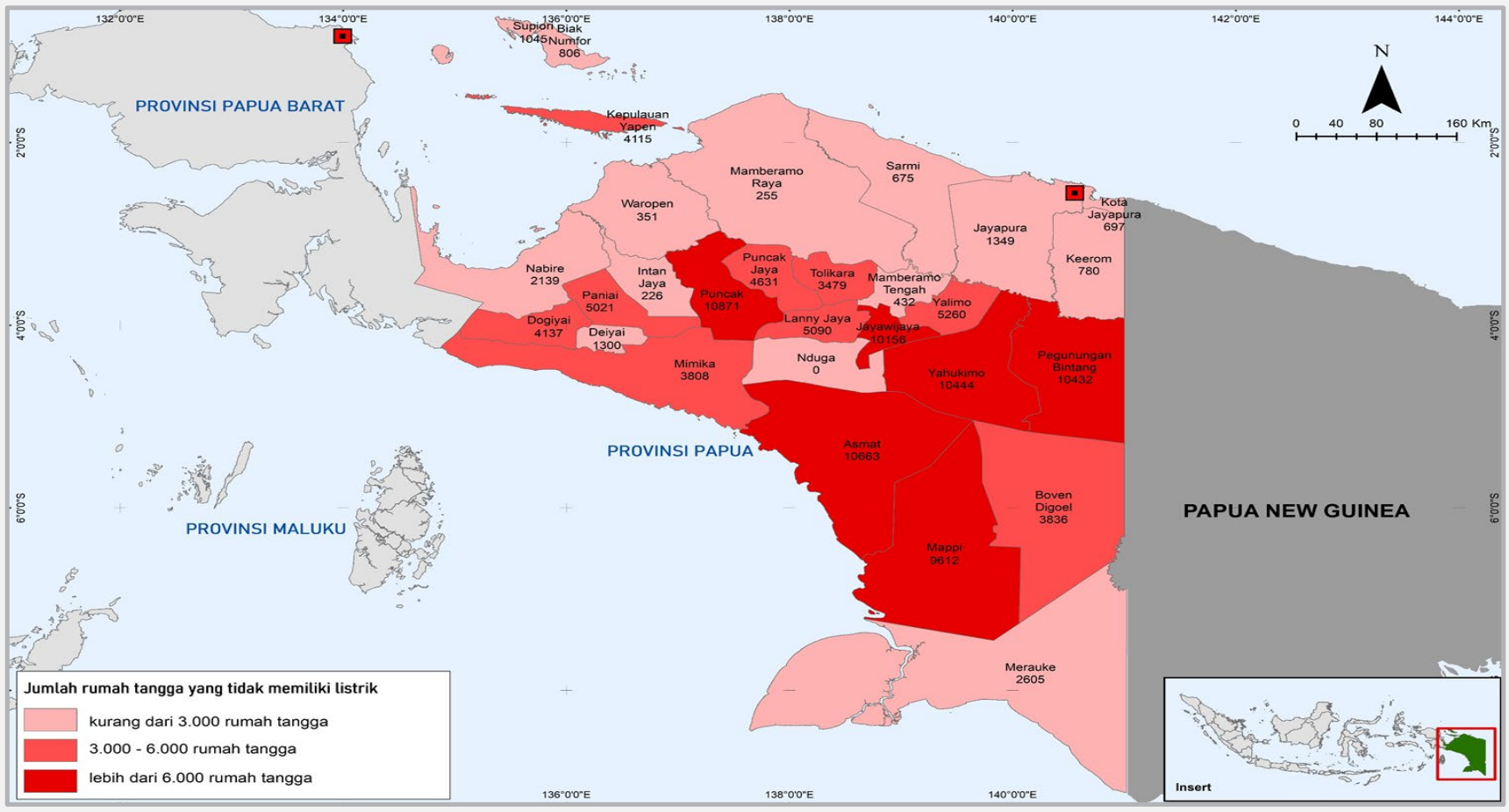

Sumber: PBDT 2015, TNP2K (diolah)

Gambar 28. Sebaran Rumah Tangga 40% Terbawah yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar di Papua Menurut Kabupaten/Kota, 2015

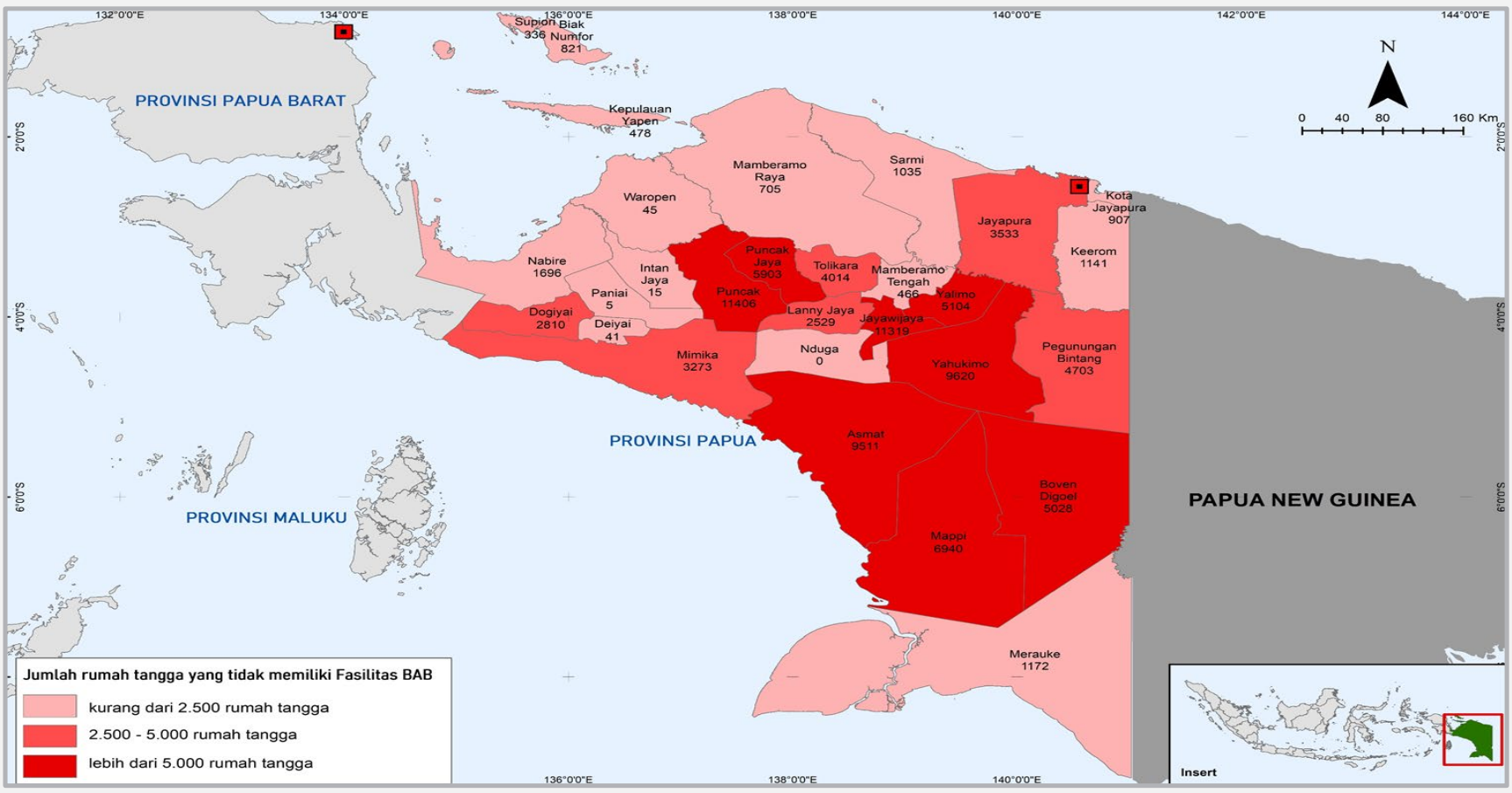

Sumber: PBDT 2015, TNP2K (diolah)

Gambar 29. Sebaran Rumah Tangga 40% Terbawah yang Tidak Memiliki *Septic Tank* di Papua Menurut Kabupaten/Kota, 2015

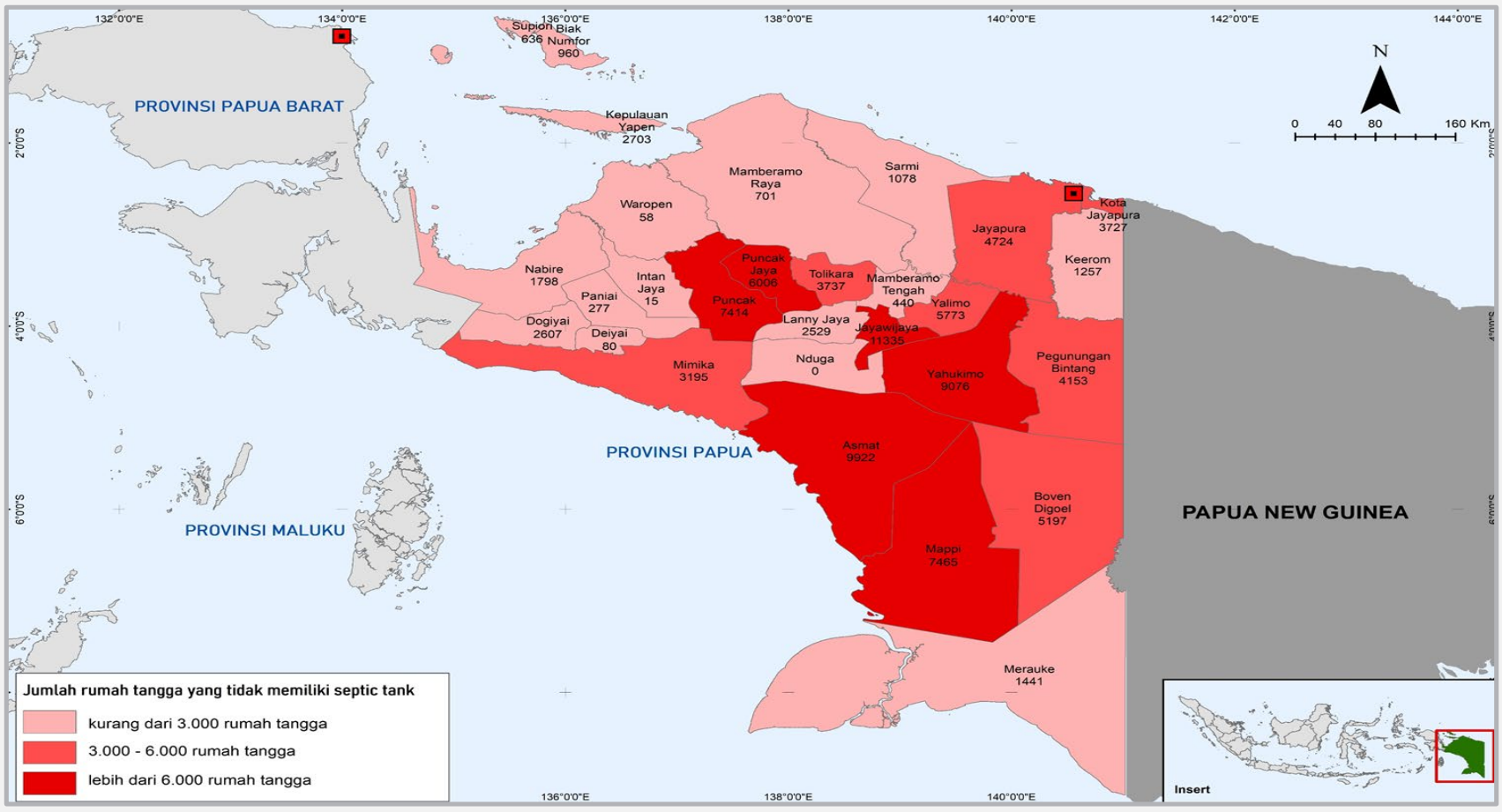

Sumber: PBDT 2015, TNP2K (diolah)

73

Infrastruktur (4)

- Kondisi infrastruktur minim di Papua Barat tersebar merata di seluruh kabupaten/kota yang berada di wilayah pegunungan dan pesisir.
- Hampir seluruh kabupaten/kota di Papua Barat (kecuali Kabupaten Maybrat) menghadapi masalah tidak memiliki fasilitas buang air besar yang layak.
- Sementara itu, permasalahan minimnya infrastruktur berupa tidak memiliki sumber air minum terlindungi, tidak memiliki listrik, maupun tidak memiliki *septic tank*, hampir dirasakan oleh penduduk miskin dan rentan yang berada dan tersebar merata di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat.

74

Gambar 30. Sebaran Rumah Tangga 40% Terbawah yang Tidak Memiliki Sumber Air Minum Terlindungi di Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015

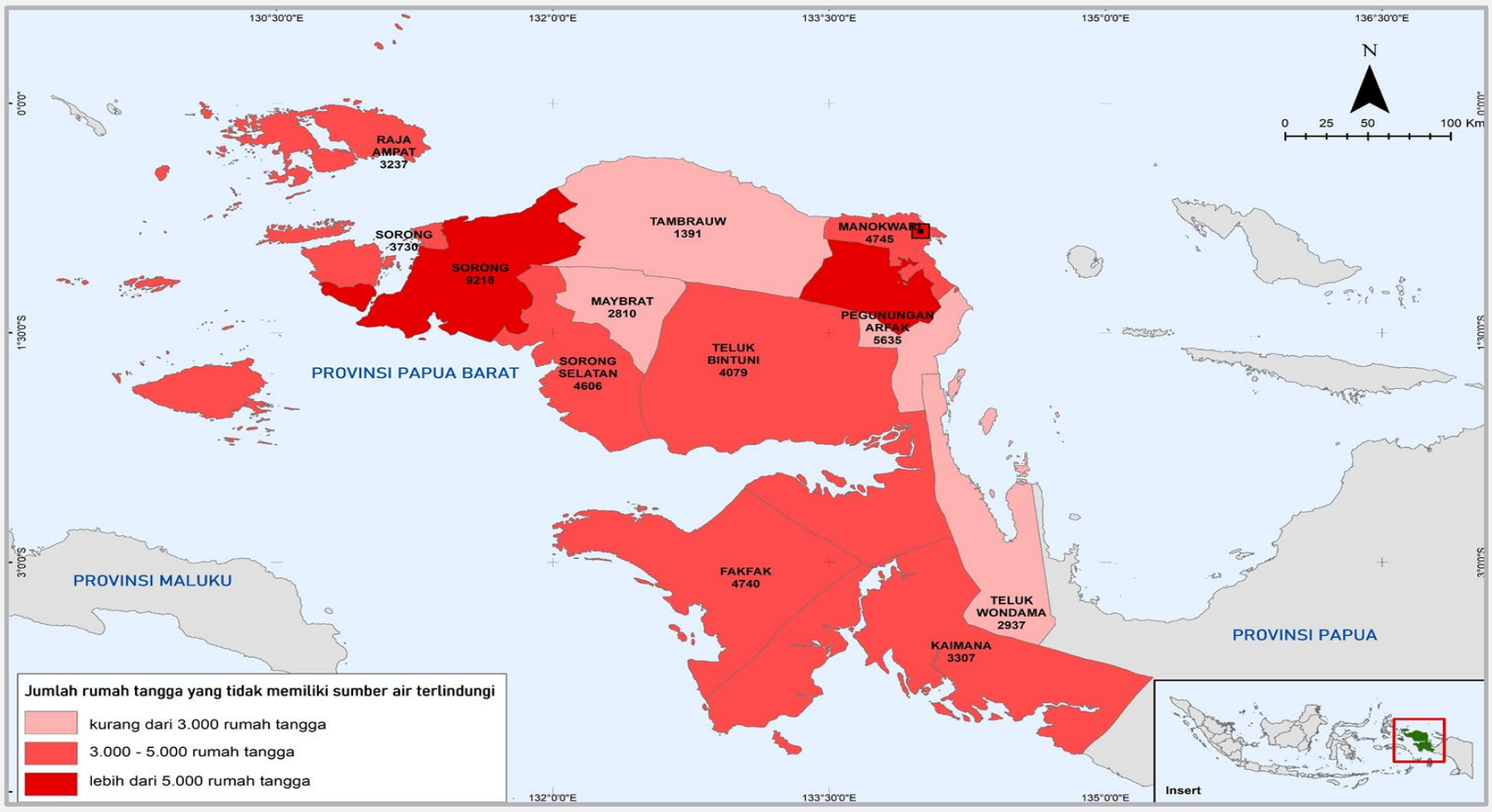

Sumber: PBDT 2015, TNP2K (diolah)

Gambar 31. Sebaran Rumah Tangga 40% Terbawah yang Tidak Memiliki Listrik di Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015

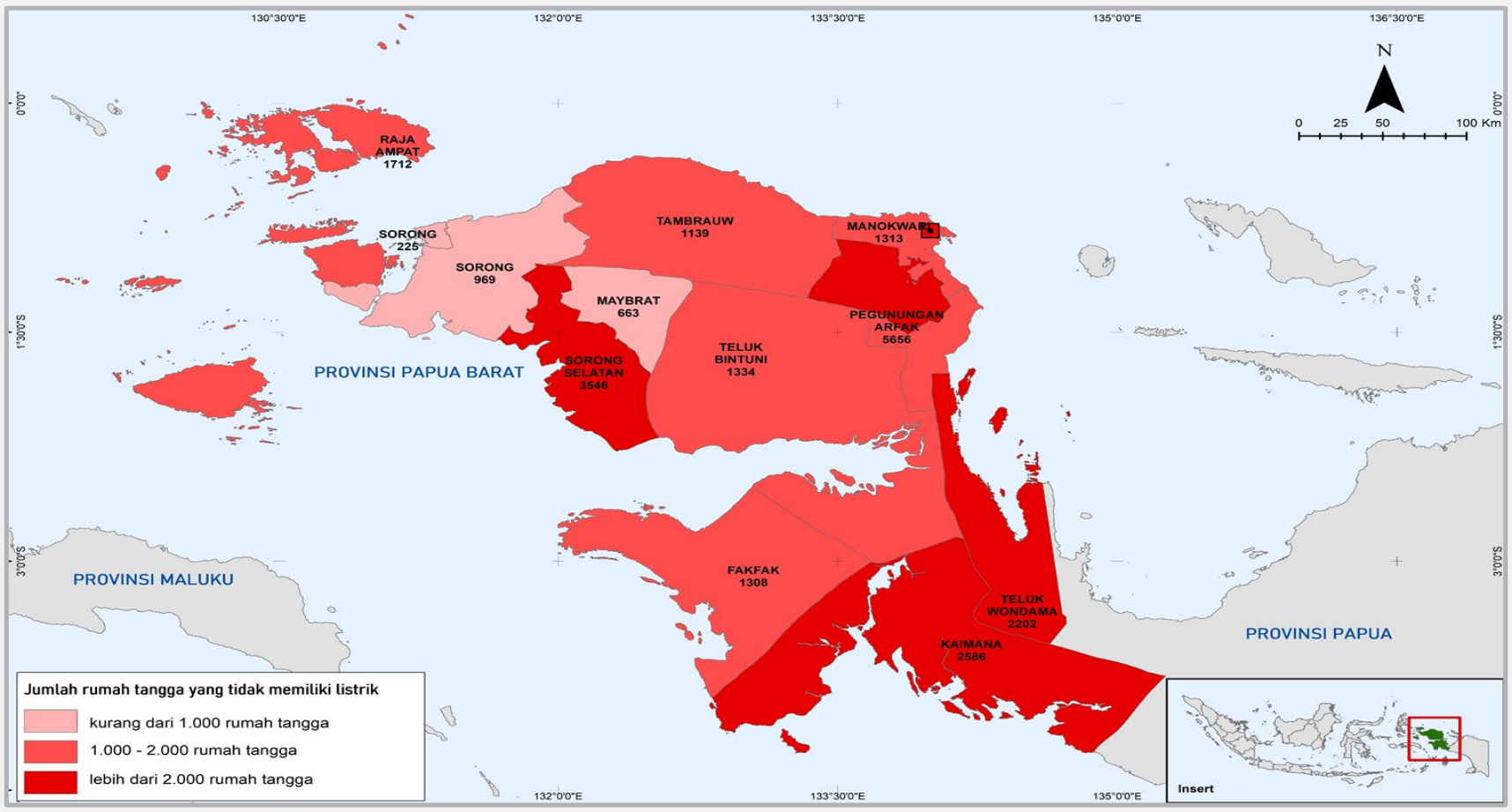

Sumber: PBDT 2015, TNP2K (diolah)

Gambar 32. Sebaran Rumah Tangga 40% Terbawah yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar di Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015

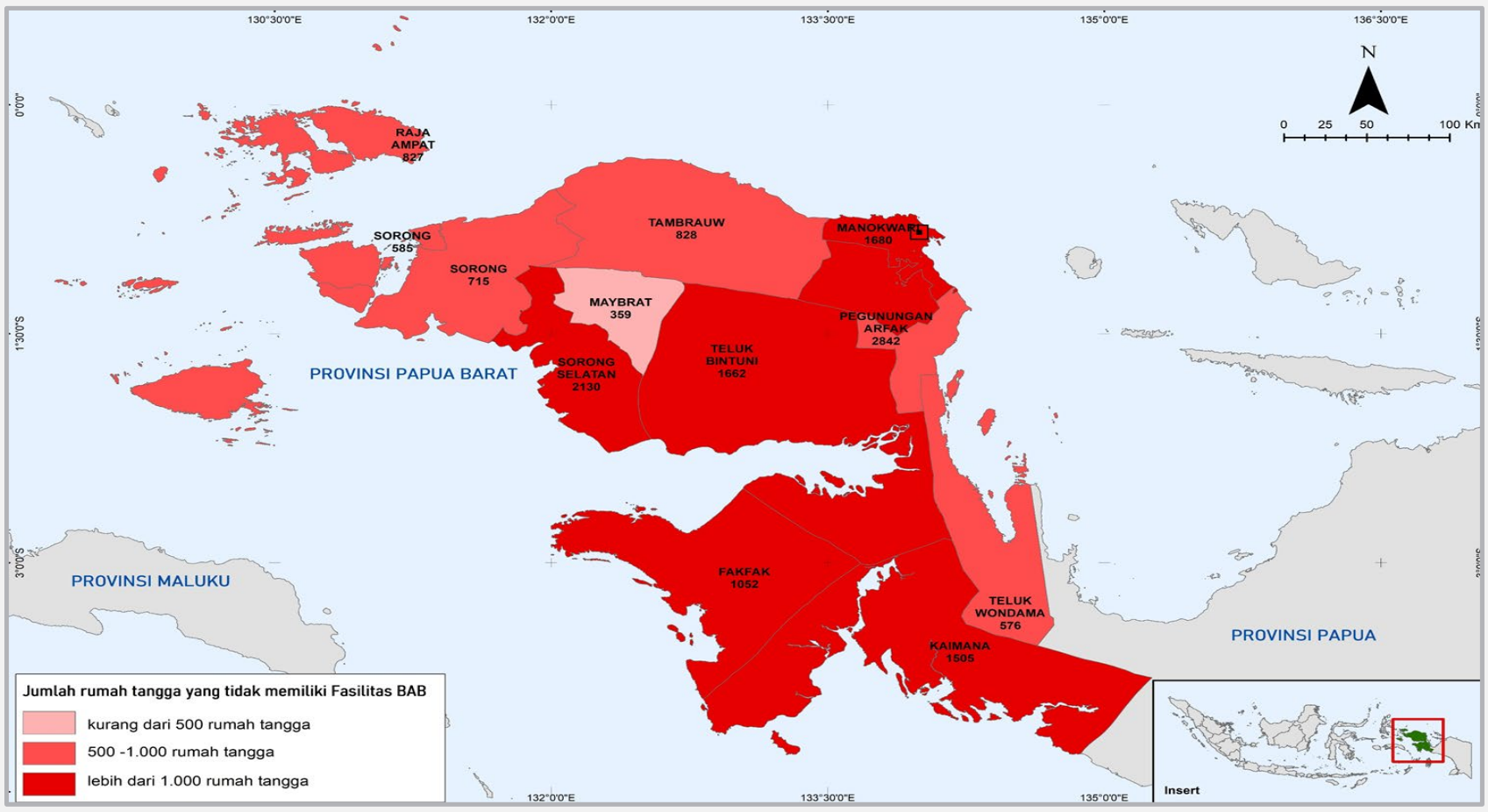

Sumber: PBDT 2015, TNP2K (diolah)

77

Gambar 33. Sebaran Rumah Tangga 40% Terbawah yang Tidak Memiliki *Septic Tank* di Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2015

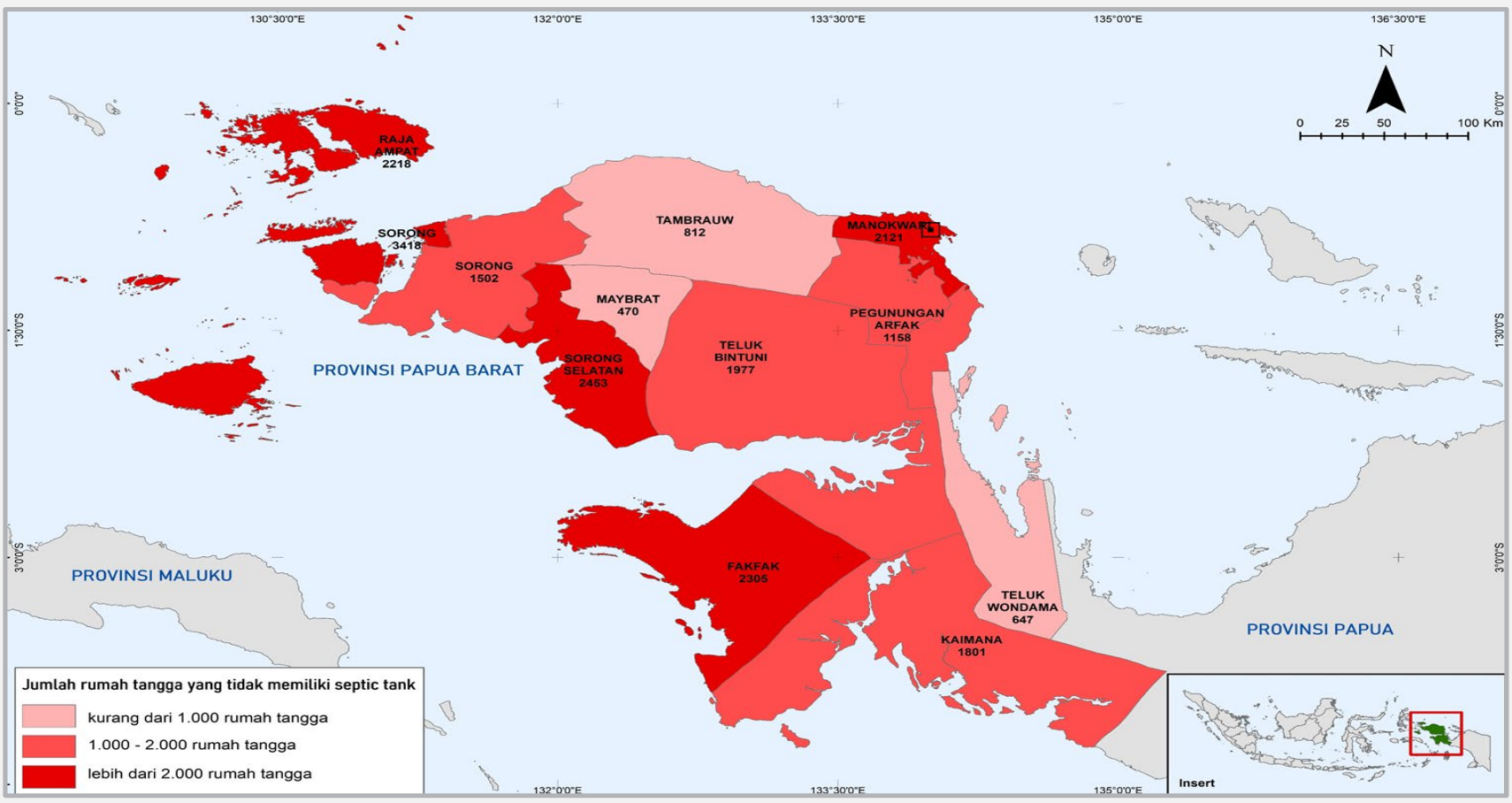

Sumber: PBDT 2015, TNP2K (diolah)

78

7 Pencapaian SDGs

79

Pencapaian SDGs

- Secara umum, hampir seluruh capaian indikator SDGs Papua dan Papua Barat lebih buruk dibandingkan capaian nasional.
- Secara khusus, hampir seluruh capaian indikator SDGs Papua Barat lebih baik dibanding Papua.
- Perlu upaya khusus untuk mengejar ketertinggalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

80

Pilar SDGs

Pilar Pembangunan Sosial

Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

81

Tabel 12. Indikator SDGs Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (**)	27,53	22,17	9,41
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (penduduk 40% terbawah/berpendapatan rendah) (*)	51,80	66,87	65,28
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (penduduk 40% terbawah/berpendapatan rendah) (*)	15,78	57,81	55,47
1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat (penduduk 40% terbawah/berpendapatan rendah) (*)	76,43	93,89	97,60
1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik PLN dan bukan PLN (penduduk 40% terbawah/berpendapatan rendah) (*)	57,26	81,19	97,45

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2018 (**) Tahun 2019

82

Tabel 13. Indikator SDGs Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari (*)	27,48	18,68	8,23
2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (**)	79,05	66,37	66,69

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2018 (**) Tahun 2019

83

Tabel 14. Indikator SDGs Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (**)	61,00	69,13	85,94
3.8.1 (a)	*Unmet need* pelayanan kesehatan (**)	2,42	4,18	5,18

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2018 (**) Tahun 2019

84

Tabel 15. Indikator SDGs Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat (**)	91,94	111,24	107,46
4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun (tahun) (*)	6,66	9,73	8,58
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun (*)	76,79	97,37	95,66

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2018 (**) Tahun 2019

85

Tabel 16. Indikator SDGs Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun (*)	20,80	22,20	21,80
5.3.1 (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (ASFR) (per 1.000 perempuan umur 15-19 tahun) (*)	65	39	36
5.6.1 (a)	Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi (*)	15,20	23,60	10,60
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur tentang metode kontrasepsi modern (*)	86,10	97,40	99,60

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2017

86

Tabel 17. Indikator SDGs Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
6.2.1 (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (*)	35,55	69,47	76,07

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2019

87

Tabel 18. Indikator SDGs Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga (*)	1,13	4,50	77,83

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2018

88

Tabel 19. Indikator SDGs Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita atas dasar harga konstan (%) (*)	5,48	3,74	3,93
8.3.1 (a)	Persentase tenaga kerja formal (*)	22,37	46,16	43,16
8.3.1 (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian (*)	98,31	91,30	88,27
8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka (**)	3,65	6,24	5,28
8.5.2 (a)	Tingkat setengah pengangguran (*)	7,83	8,56	6,62
8.6.1	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (*)	17,11	18,80	22,48

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2018 (**) Tahun 2019

89

Tabel 20. Indikator SDGs Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
9.c.1 (a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (*)	36,31	59,88	59,59
9.c.1 (b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet (**)	19,59	36,41	39,90

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2017 (**) Tahun 2018

90

Tabel 21. Indikator SDGs Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
10.1.1	Koefisien Gini (**)	0,391	0,381	0,380
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (*)	27,74	23,01	9,82

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2018 (**) Tahun 2019

Tabel 22. Indikator SDGs Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (*)	58,23	94,55	95,70

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2018

Tabel 23. Indikator SDGs Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (*)	-	-	53,53
12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (juta ton) (**)	-	-	8,02

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2018 (**) Tahun 2019

93

Tabel 24. Indikator SDGs Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
13.1.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah (*)	-	-	26
13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (*)	-	-	1

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2018

94

Tabel 25. Indikator SDGs Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan (*)	-	-	23,31

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2019

95

Tabel 26. Indikator SDGs Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
15.1.1 (a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan (*)	-	-	48,7
15.2.1 (b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem (*)	-	-	622.067

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2018

96

Tabel 27. Indikator SDGs Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir (*)	0,23	0,25	0.08
16.9.1	Persentase anak berumur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran (*)	29,53	52,40	71,92
16.9.1. (a)	Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40% bawah yang memiliki akta kelahiran (*)	21,57	57,79	77,11
16.9.1. (b)	Persentase anak berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran (*)	36,32	70,75	83,55

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2018 (**) Tahun 2019

97

Tabel 28. Indikator SDGs Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Indikator SDGs		Papua	Papua Barat	Indonesia
17.8.1	Proporsi individu yang menggunakan internet (*)	19,60	36,40	39,90
17.18.1 (b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama (*)	95,30	92,40	86,91
17.19.2 (e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (*)	33,80	72	50,36

Sumber: *Dashboard* SDGs, Bappenas
Catatan: (*) Tahun 2018

98

Terima kasih